

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI
DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP
BELANJA MODAL DI WILAYAH MALANG RAYA
(STUDI KASUS 3 KABUPATEN/KOTA DI MALANG
RAYA TAHUN 2007-2016)**

SKRIPSI

Disusun oleh :

**Franciska Yuniarti
145020101111080**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

repository.ub.ac.id

**THE EFFECT OF LOCAL-OWNED SOURCE
REVENUE AND BALANCED FUND ON CAPITAL
EXPENDITURE: A CASE STUDY ON 3 REGENCIES/
MUNICIPALITIES IN MALANG RAYA YEAR 2007-2016**

MINOR THESIS

**By:
Franciska Yuniarti
145020101111080**

**Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Attainment of the Degree of *Bachelor of Economics***



**DEPARTMENT OF ECONOMICS
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS
UNIVERSITY OF BRAWIJAYA
MALANG
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**"ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL DI WILAYAH MALANG
RAYA (Studi Kasus 3 Kabupaten/Kota di Malang Raya Tahun 2007-2016)"**

Yang disusun oleh :

Nama : Franciska Yuniarti
NIM : 145020101111080
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Keuangan Negara dan Keuangan Daerah

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 04 Juli 2018 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Moh. Khusaini, SE., M.Si., MA
NIP. 1971011119988021001
(Dosen Pembimbing)
2. Yenny Kornitasari, SE., ME
NIP. 2015078810012001
(Dosen Penguji I)
3. Aminnullah A. Muttaqin, M.Sc., Fin
NIP. 2016078711241001
(Dosen Penguji II)

Malang, 4 Juli 2018
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan,

Marlina Ekawaty, SE., M.Si., Ph.D.
NIP.196503111989032001

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul :

**Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan
Terhadap Belanja Modal di Wilayah Malang Raya
(Studi Kasus 3 Kabupaten/Kota di Wilayah Malang Raya Tahun 2007-2016)**

Yang disusun oleh :

Nama : Franciska Yuniarti
NIM : 145020101111080
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Keuangan Negara dan Keuangan Daerah

Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Komprehensif.

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan



Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D
196503111989032001

Malang, 30 Mei 2018
Mengetahui,

Dosen Pembimbing,



Dr. Moh. Khusaini SE., M.Si., MA
197101111998021001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Franciska Yuniarti
 Tempat, tanggal lahir : Malang, 20 Juni 1995
 NIM : 145020101111080
 Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi
 Konsentrasi : Keuangan Negara dan Keuangan Daerah
 Alamat : Jalan Mayjen Panjaitan Dalam Nomor 25A RT.04 RW.03
 Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal di Wilayah Malang Raya (Studi Kasus 3 Kabupaten/Kota di Malang Raya Tahun 2007-2016)

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesariaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
 Dosen Pembimbing,

Malang, 30 Mei 2018

Yang membuat pernyataan,


 Dr. Moh. Khusaini, SE., M.Si., MA
 197101111998021001


 Franciska Yuniarti
 145020101111080


 Mengetahui,
 Ketua Program Studi
 Ekonomi Pembangunan ,

 Dra. Marlina Ekawaty, M.si., Ph.D
 196503111989032001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Franciska Yuniarti
NIM : 145020101111080
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 20 Juni 1995
Agama : Kristen
Alamat : Jalan Mayjen Panjaitan Dalam Nomor 25 A,
Malang
Nomor Telepon/HP : 081334577160
Email : siskafranciska87@gmail.com

**Riwayat Pendidikan**

- TKK Sang Timur Malang (2000 – 2002)
- SDK Sang Timur Malang (2002 – 2008)
- SMPK Sang Timur Malang (2008 – 2011)
- SMAK Frateran Malang (2011 – 2014)
- S1 Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya Malang (2014 – 2018)

Pengalaman Kepanitiaan

1. Staff Divisi Konsumsi, Pemilwa IE Tahun 2016

Pengalaman Kerja

1. Magang di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara II Surabaya (2 Oktober 2017 – 3 November 2017)

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI
DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL DI WILAYAH
MALANG RAYA
(STUDI KASUS 3 KABUPATEN/KOTA DI MALANG RAYA TAHUN 2007-2016)**

Franciska Yuniarti

Email : siskafranciska87@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja modal di wilayah Malang Raya tahun 2007-2016. Estimasi dilakukan dengan regresi data panel yang menggunakan program evIEWS 10. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, DBH berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Secara keseluruhan PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di wilayah Malang Raya pada tahun 2007-2016.

Kata kunci: Otonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Belanja Modal.

**THE EFFECT OF LOCAL-OWNED SOURCE REVENUE AND BALANCED FUND ON
CAPITAL EXPENDITURE: A CASE STUDY ON 3 REGENCIES/ MUNICIPALITIES IN
MALANG RAYA YEAR 2007-2016**

Franciska Yuniarti

Email : siskafranciska87@gmail.com

ABSTRAC

This study aims to determine the effect of *Local Own Revenue* (PAD), *General Allocation Fund* (DAK), *Revenue Sharing Fund* (DBH) to capital expenditure in Malang Raya area from 2007 to 2016. Estimation is done by regression of panel data using program eviws 10. The results of this study indicate that *the Local Own Revenue* (PAD) has a positive and significant impact on capital expenditures, *General Allocation Fund* (DAU) has a positive and significant impact on capital expenditure, *Special Allocation Fund* (DAK) has a positive and significant impact on capital expenditure, *Revenue Sharing Fund* (DBH) has negative and insignificant effect on capital expenditure. Overall, *Local Own Revenue* (PAD), *General Allocation Fund* (DAU), *Special Allocation Fund* (DAK), and *Revenue Sharing Fund* (DBH) have a significant effect on capital expenditure in Malang Raya area in 2007 – 2016.

Keywords : *Regional Autonomy, Local Own Revenue* (PAD), *General Allocation Fund* (DAU), *Special Allocation Fund* (DAK), *Revenue Sharing Fund* (DBH), *Capital Expenditure*.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul **Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal di Wilayah Malang Raya (Studi Kasus 3 Kabupaten/Kota di Malang Raya Tahun 2007-2016)**. Penyusunan skripsi ini ditulis untuk memenuhi syarat dalam mencapai derajat Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang.

Selama proses penelitian dan penyusunan skripsi, penulis mendapatkan banyak doa, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak karena pada hakikatnya manusi tercipta untuk saling membantu dan melengkapi satu sama lain. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang mendalam bagi beberapa pihak yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini, di antaranya:

1. Tuhan Yesus karena berkat yang telah diberikan kepada penulis selama hidup di dunia ini;
 2. Bapak Mulyadi dan Ibu Lidia Sulasmi yang senantiasa selalu memberi motivasi, doa, materi, semangat, kasih sayang, dan dukungan yang sangat tulus.
 3. Dosen Pembimbing, Dr. Moh. Khusaini, SE., M.Si., MA yang penulis kenal sebagai praktisis dan akademisi dalam bidang keuangan daerah.
- Terimakasih atas masukan yang bijak terkait arah skripsi penulis.

4. Ibu Yenny Kornitasasi, SE., ME dan Bapak Aminnullah A. Mttaqin, M.Sc., Fin sebagai dosen penguji yang telah memberikan banyak saran dan perbaikan untuk skripsi ini;
5. Bapak Dr.rer.pol. Wildan Syafitri, SE. ME. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Ibu Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D.selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang;
6. Bapak Dr. Susilo sebagai dosen pembahas dalam seminar proposal yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan bimbingan kepada penulis, serta Karyawan/Karyawati Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah banyak membantu dalam administrasi akademi penulis;
8. Teman-teman Jurusan Ilmu Ekonomi terutama Program Studi Ekonomi Pembangunan 2014 yang sama-sama berjuang menyelesaikan skripsi;
9. Teman-teman Konsentrasi Keuangan Negara dan Daerah (KNKD) 2014 yang tak segan untuk selalu saling membantu dan saling dukung dalam menyelesaikan skripsi;
10. Teman- teman grup “Skripsi Squad”, terimakasih atas semua waktu yang sudah kita lalui bersama baik senang maupun duka.
11. Terimakasih kepada Lestiono Kristanto (Yoyok Only) yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas cover dan abstrak bahasa inggris.
12. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang juga telah terlibat, berperan serta membantu dalam menyusun skripsi sampai selesai.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik membangun dari pembaca

agar dapat dilakukan perbaikan atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan semua pihak pada umumnya. Aamiin.

Malang, 4 Juli 2018

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
SURAT PENYATAAN.....	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Teori Konsumsi.....	12
2.2 Otonomi Daerah	13
2.2.1 Pengertian Otonomi Daerah	13
2.2.2 Tujuan Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	15
2.3 Belanja Modal	15
2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	17
2.4.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	19
2.5 Dana Perimbangan.....	20
2.5.1 Dana Alokasi Umum (DAU)	21
2.5.2 Dana Alokasi Khusus (DAK).....	24
2.5.3 Dana Bagi Hasil (DBH).....	24
2.6 Hubungan Pendapatan dan Belanja	25
2.7 Penelitian Terdahulu.....	26
2.8 Kerangka Pikir	28
2.9 Hipotesis	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Jenis Penelitian.....	32

3.2 Populasi Penelitian	33
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.4 Jenis dan Sumber Data	34
3.5 Definisi Operasional Variabel	34
3.5.1 Definisi Variabel	34
3.5.2 Operasional Variabel	36
3.6 Metode Analisis	37
3.6.1 Regresi Data Panel	37
3.6.2 Pemilihan Model	38
3.6.3 Uji Asumsi Klasik	41
3.6.4 Uji Hipotesis	42
BAB IV PEMBAHASAN.....	44
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian	44
4.1.1 Kota Malang	44
4.1.2 Kabupaten Malang	47
4.1.3 Kota Batu	50
4.2 Analisis Data	52
4.2.1 Pemilihan Model	53
4.2.2 Uji Asumsi Klasik	56
4.3 Uji Statistik	59
4.3.1 Uji Persamaan Regresi Panel	59
4.3.2 Uji F	61
4.3.3 Koefisien Determinasi (R^2).....	61
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian	61
4.4.1 Pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal	61
4.4.2 Pengaruh DAU Terhadap Belanja Modal.....	64
4.4.3 Pengaruh DAK Terhadap Belanja Modal.....	67
4.4.4 Pengaruh DBH Terhadap Belanja Modal.....	70
BAB V PENUTUP	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 3.2 Operasional Variabel.....	36
Tabel 4.1 Data Realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Modal Kota Malang Tahun 2007-2016.....	46
Tabel 4.2 Data Realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Modal Kabupaten Malang Tahun 2007-2016.....	49
Tabel 4.3 Data Realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Modal Kota Batu Tahun 2007-2016.....	52
Tabel 4.4 Hasil Regresi Uji Chow.....	54
Tabel 4.5 Hasil Uji Regresi <i>Lagrange Multiplier</i>	55
Tabel 4.6 Hasil Pemilihan Model Regresi.....	55
Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Autokorelasi.....	56
Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi Multikolinieritas.....	57
Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi Heteroskedastisitas.....	58
Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Normalitas.....	59
Tabel 4.11 Hasil Analisis Regresi	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Realisasi PAD Malang Raya Tahun 2007-2016.....	6
Gambar 1.2 Data Realisasi Dana Perimbangan Malang Raya Tahun 2007-2016	7
Gambar 1.3 Data Realisasi Belanja Modal Malang Raya Tahun 2007-2016	8
Gambar 2.1 Skema DAU Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 12.....	21
Gambar 2.2 Kerangka Pikir.....	28
Gambar 4.1 Peta Kota Malang.....	45
Gambar 4.2 Peta Kabupaten Malang.....	48
Gambar 4.3 Peta Kota Batu.....	51
Gambar 4.4 Grafik PAD dan Belanja Modal di Wilayah Malang Raya Tahun 2007-2016.....	63
Gambar 4.5 Grafik DAU dan Belanja Modal di Wilayah Malang Raya Tahun 2007-2016.....	65
Gambar 4.6 Grafik DAK dan Belanja Modal di Wilayah Malang Raya Tahun 2006-2017.....	68
Gambar 4.7 Grafik DBH dan Belanja Modal di Wilayah Malang Raya Tahun 2006-2017.....	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Realisasi PAD, DAU, DAK, DBH, dan Belanja Modal di Wilayah Malang Raya Tahun 2007-2016.....	77
Lampiran 2 Tabel Hasil Regresi Uji Chow.....	78
Lampiran 3 Tabel Hasil Regresi Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	78
Lampiran 4 Tabel Hasil Uji Regresi Autokorelasi.....	79
Lampiran 5 Tabel Hasil Uji Regresi Multikolinieritas.....	79
Lampiran 6 Tabel Hasil Uji Regresi Heteroskedastisitas.....	79
Lampiran 7 Tabel Hasil Uji Regresi Normalitas	80
Lampiran 8 Tabel Hasil Analisis Regresi.....	81



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, menyebutkan bahwa daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Undang-undang tersebut merupakan wujud dari otonomi daerah. Diberlakukannya UU No. 32 dan UU No. 33 Tahun 2004 memberikan kewenangan dan keleluasaan yang lebih luas bagi pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaksana dan promotor pembangunan di daerah untuk mengatur dan menentukan sendiri kegiatan pembangunan wilayah yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat setempat. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diberlakukannya otonomi daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan cara meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan juga tentunya dibutuhkan peran serta dari masyarakat.

Dalam UU No. 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa melalui otonomi daerah, pembangunan ekonomi daerah diharapkan terwujud melalui pengelolaan sumber-sumber daerah. Tujuan utama dari pemberlakuan sistem otonomi daerah tersebut

yaitu guna meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah serta menambah kekuatan fiskal daerah melalui program andalan daerah sehingga mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mempersiapkan diri dalam otonomi daerah adalah dengan cara melakukan strategi penataan pada keuangan daerah dan anggaran daerah. Keuangan daerah merupakan keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijakan penganggaran yang meliputi pendapatan dan belanja daerah (Nogi, 2005). Sedangkan menurut Mardiasmo (2004), anggaran daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (1 tahun).

Untuk bisa menjalankan otonomi daerah dengan baik, daerah diharuskan untuk mampu menggali potensi-potensi sumber pendapatan daerahnya sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam UU No 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang didapatkan daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah sendiri bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah digunakan sebagai wadah untuk memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sebagai bentuk dari desentralisasi. Pertumbuhan pendapatan pemerintah sangat erat hubungannya dengan pengeluaran pemerintah. Begitu pula dengan Pendapatan Asli Daerah dan belanja modal juga memiliki hubungan yang positif. Semakin tinggi nilai Pendapatan Asli Daerah dalam suatu daerah, maka belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah juga semakin meningkat.

Selain dari Pendapatan Asli Daerah, komponen penerimaan lain yang erat kaitannya dengan pengeluaran pemerintah daerah Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan daerahnya, hal itu akan menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah yang lain. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Tujuan diberikannya Dana Perimbangan adalah untuk mengurangi ketimpangan dan untuk pemerataan fiskal pada setiap daerah. Dana Perimbangan merupakan komponen terbesar dalam alokasi transfer ke daerah sehingga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu komponen dalam Dana Perimbangan adalah Dana Alokasi Umum yang pengalokasiannya lebih ditekankan pada pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dengan adanya bantuan dana dari pemerintah ini, setiap daerah diharapkan mampu mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah yang didapat untuk membiayai belanja modal di daerah masing-masing.

Selain Dana Alokasi Umum, dana yang bersumber dari pemerintah pusat lainnya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk daerah dengan tujuan membantu membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional seperti yang tertulis pada UU No. 33 Tahun 2004. Penggunaan Dana Alokasi Khusus oleh daerah diatur oleh pemerintah pusat untuk membiayai kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan

jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, sarana prasarana pedesaan, lingkungan hidup, kehutanan, pertanian, perdagangan, perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam komponen belanja modal dan pemerintah daerah diharuskan untuk mengalokasikan dana pendamping yang besarnya 10% dari nilai Dana Alokasi Khusus yang diterima.

Sesuai dengan pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa penerimaan (pendapatan) memiliki hubungan yang erat dengan pengeluaran (belanja). Hal ini dibuktikan dengan tingginya penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan akan mempengaruhi belanja daerah. Salah satu jenis belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah adalah belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai aset tetap. Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam anggaran APBD untuk menambah aset tetap. Pengalokasian belanja modal dilakukan berdasarkan pada kebutuhan daerah akan kebutuhan sarana dan prasarana, seperti kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Belanja modal memiliki peran yang sangat penting karena belanja modal memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik.

Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan sarana dan prasarana. Jika suatu daerah memiliki sarana dan prasarana yang baik dapat menarik investor untuk melakukan investasi dan juga masyarakat dapat beraktifitas dengan nyaman sehingga tingkat produktifitas akan semakin meningkat. Dapat dikatakan bahwa jika belanja modal meningkat akan berdampak pada produktifitas masyarakat yang semakin meningkat dan bertambahnya jumlah investor yang juga akan meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah. Dalam penelitian ini studi kasus yang diteliti adalah wilayah Malang Raya. Pemilihan wilayah Malang Raya tersebut didasarkan pada data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan belanja modal. Dari data ketiga komponen tersebut, wilayah Malang Raya memiliki keunikan tersendiri antara satu dengan yang lainnya. Latar belakang lainnya adalah baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 19 orang anggota DPRD Kota Malang yang didalamnya termasuk Walikota Malang atas kasus korupsi dana APBD tahun 2015. Selain itu selama 10 tahun terakhir ini wilayah Malang Raya telah mengalami pergantian pemerintahan dua kali. Dari adanya peristiwa tersebut dapat penulis jadikan salah satu alasan penelitian dilakukan. Hal itulah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di daerah Malang Raya yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu pada tahun 2007-2016 selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya, hal ini didukung dengan adanya Dana Perimbangan dari pemerintah pusat yang diharapkan dapat membantu meningkatkan alokasi belanja modal pemerintah daerah yang nantinya akan berdampak pada pelayanan publik yang semakin membaik. Hal tersebut bisa dibuktikan dari Gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1. Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Malang Raya Tahun 2007-2016



Sumber: Data diolah DJPK, 2018

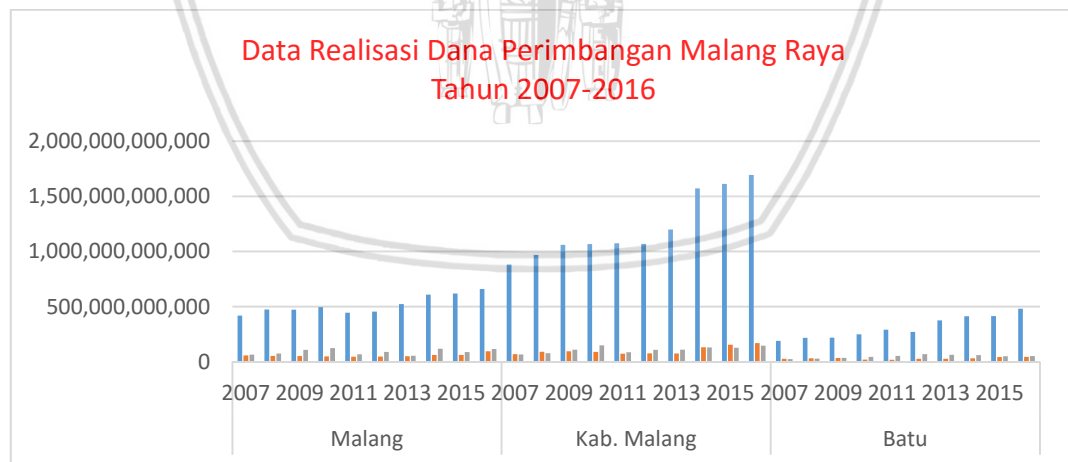
Dari data pada gambar 1.1 diatas terlihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang selalu mengalami peningkatan, hanya pada tahun 2008 menurun dari tahun sebelumnya dari Rp 87,115,7 Milyar menjadi Rp 83,403,6 Milyar. Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang cenderung selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hanya saja pada tahun 2010 turun dari tahun sebelumnya menjadi Rp 130,466,0 Milyar, dan juga pada tahun 2011 menjadi Rp 121,130,9 Milyar. realisasi Pendapatan Daerah di Kota Batu selalu mengalami peningkatan, hanya saja pada tahun 2009 mengalami penurunan menjadi Rp 17,386,7 Milyar. Dapat disimpulkan bahwa realisasi PAD untuk daerah Malang Raya cenderung meningkat di setiap tahunnya.

Selain dari PAD, komponen penerimaan lain yang erat kaitannya dengan pengeluaran pemerintah daerah adalah Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana

Perimbangan ini berasal dari APBN yang nantinya akan diberikan ke setiap daerah sesuai dengan kebutuhannya. Setiap daerah mendapatkan pengalokasian Dana Perimbangan yang berbeda-beda karena setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan daerahnya, dan hal itu akan menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah yang lain. Oleh karena itu pemerintah pusat mengalokasikan Dana Perimbangan yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Tujuan diberikannya Dana Perimbangan adalah untuk mengurangi ketimpangan dan untuk pemerataan fiskal pada setiap daerah. Begitu pula dengan daerah Malang Raya yang juga mendapatkan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat untuk bisa memenuhi kebutuhan daerahnya agar bisa mengurangi ketimpangan. Hal tersebut bisa dilihat dari Gambar 1.2 berikut:

Gambar 1.2. Data Realisasi Dana Perimbangan Malang Raya Tahun 2007-2016



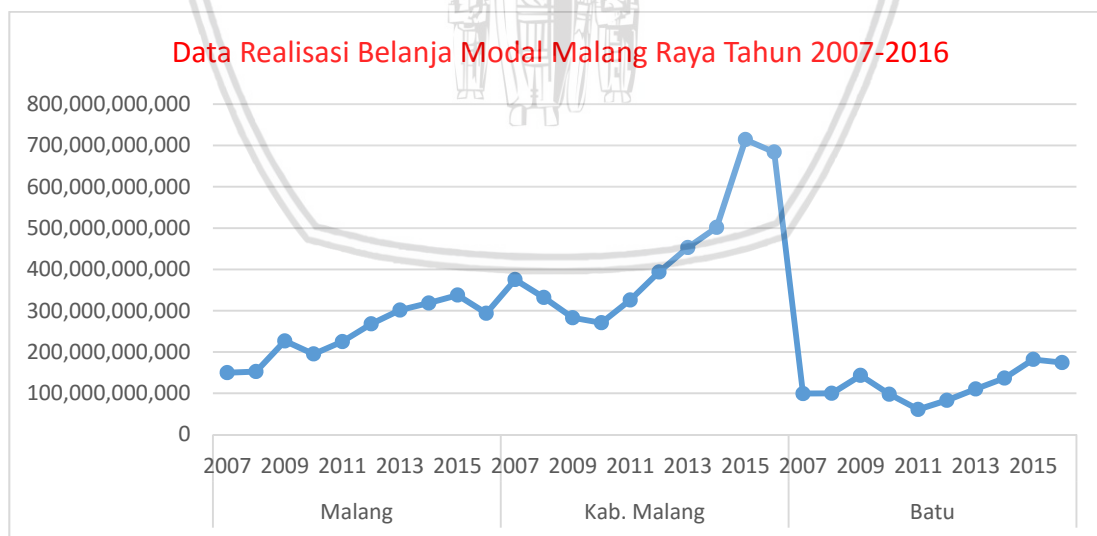
Sumber: Data diolah DJPK, 2018

Dari data pada gambar 1.2. di atas dapat diketahui bahwa realisasi Dana Perimbangan di wilayah Malang Raya cenderung selalu meningkat di setiap tahunnya.

Dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam membantu daerah untuk bisa mencukupi kebutuhan daerahnya masih sangat besar.

Besarnya penerimaan PAD dan Dana Perimbangan akan mempengaruhi belanja daerah. Salah satu jenis belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah adalah belanja modal. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam anggaran APBD guna menambah aset tetap. Pengalokasian belanja modal dilakukan dengan berdasar pada kebutuhan daerah masing-masing akan kebutuhan sarana dan prasarana. Belanja modal memiliki peran yang sangat penting karena belanja modal memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Realisasi belanja modal di daerah Malang Raya selama tahun 2007-2016 bersifat fluktuatif karena selalu naik turun dalam tahun-tahun tersebut, seperti pada Gambar 1.3 berikut:

Gambar 1.3. Data Realisasi Belanja Modal Malang Raya Tahun 2007-2016



Sumber: Data diolah DJPK, 2018

Dari data pada gambar 1.3 di atas dapat dilihat bahwa realisasi belanja modal di Wilayah Malang Raya juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun, hanya saja di beberapa tahun mengalami penurunan. Seperti pada tahun 2016, secara bersama-sama realisasi belanja modal di wilayah Malang Raya mengalami penurunan.

Dijelaskan sebelumnya bahwa semakin tinggi nilai Pendapatan Asli Daerah dalam suatu daerah, maka belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah juga semakin meningkat. Selain itu Dana Perimbangan yang meningkat juga berpengaruh pada peningkatan belanja modal, karena Dana Perimbangan juga merupakan pendapatan daerah yang didapat dari pemerintah pusat. Akan tetapi hal itu tidak berjalan sesuai dengan kenyataan. Seperti terlihat pada Gambar 1.1, pada tahun 2016 Pendapatan Asli Daerah daerah Malang Raya meningkat dari tahun sebelumnya, dan juga pada Gambar 1.2 pada tahun 2016 Dana Perimbangan di daerah Malang Raya juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tetapi hal itu tidak didukung oleh peningkatan belanja modal pada tahun 2016, karena pada tahun 2016 belanja modal di daerah Malang Raya justru menurun.

Dengan adanya realita seperti itu maka penulis merasa perlu untuk mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan tersebut, apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang didalamnya meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil secara teori mempengaruhi belanja modal di Wilayah Malang Raya pada tahun 2007-2016. Oleh karena itu penulis memutuskan untuk mengambil judul **“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal di Wilayah Malang Raya (Studi Kasus 3 Kabupaten/Kota di Malang Raya Tahun 2007-2016)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan, maka rumusan masalah yang bisa digunakan adalah:

1. Apakah PAD berpengaruh terhadap belanja modal di daerah Malang Raya pada tahun 2007-2016?
2. Apakah DAU berpengaruh terhadap belanja modal di daerah Malang Raya pada tahun 2007-2016?
3. Apakah DAK berpengaruh terhadap belanja modal di daerah Malang Raya pada tahun 2007-2016?
4. Apakah DBH berpengaruh terhadap belanja modal di daerah Malang Raya pada tahun 2007-2016?
5. Apakah PAD, DAU, DAK, dan DBH secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal di daerah Malang Raya pada tahun 2007-2016?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah digunakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh PAD terhadap belanja modal di daerah Malang Raya pada tahun 2007-2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh DAU terhadap belanja modal di daerah Malang Raya pada tahun 2007-2016.
3. Untuk mengetahui pengaruh DAK terhadap belanja modal di daerah Malang Raya pada tahun 2007-2016.

4. Untuk mengetahui pengaruh DBH terhadap belanja modal di daerah Malang Raya pada tahun 2007-2016.
5. Untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH secara bersama-sama terhadap belanja modal di daerah Malang Raya pada tahun 2007-2016.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai salah satu masukan atau kontribusi akademis dan menambah pengetahuan peneliti untuk bisa mengenal pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja modal di daerah Malang Raya

2. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan atau sumbangan pemikiran dan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemerintah daerah Kota Malang Raya ataupun lembaga/dinas terkait dalam upaya mengetahui pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja modal di daerah Malang Raya

3. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil dari penelitian bisa digunakan sebagai sumbangan pemikiran ataupun ide yang bisa membantu penelitian selanjutnya tentang pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja modal di wilayah Malang Raya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Konsumsi

Keynes berpendapat bahwa pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga dalam perekonomian bergantung pada besarnya pendapatan yang diterima (Case & Fair, 2007). Perbandingan jumlah pendapatan dengan jumlah konsumsi disebut kecenderungan mengonsumsi atau *Marginal Propensity to Consume* (MPC). Semakin tinggi tingkat MPC suatu rumah tangga/daerah maka semakin tinggi pula pendapatan yang digunakan untuk kegiatan konsumsi dan sebaliknya. Untuk memperkuat pernyataan tersebut dibutuhkan adanya perhitungan pendapatan dan konsumsi melalui teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan absolut. Teori tersebut menyatakan jumlah konsumsi sangat erat hubungannya dengan pendapatan negara yaitu dapat mempengaruhi fluktuasi perekonomian negara yang diukur dari harga konstan.

Menurut Irving Fisher, seseorang melakukan konsumsi dengan mempertimbangkan keadaan pada saat ini dan keadaan pada saat yang akan datang. Kedua keadaan atau kondisi ini menentukan jumlah seberapa besar pendapatan yang akan disimpan dan seberapa besar pendapatan yang akan dikeluarkan untuk melakukan konsumsi. Sementara itu, Milton Friedman berpendapat bahwa jumlah konsumsi yang dibutuhkan seseorang bergantung pada pendapatan permanen seseorang tersebut. Yang dimaksud dengan pendapatan permanen adalah pendapatan dalam jangka panjang atau pendapatan rata-rata. Rumusan untuk fungsi

konsumsi dan pendapatan menurut Friedman adalah $C = cYP$, $\rightarrow c = MPC$, $YP =$ pendapatan permanen. Berdasarkan fungsi tersebut dapat dikatakan bahwa rata-rata konsumsi bergantung pada rasio pendapatan permanen juga pendapatan sekarang.

Dari ketiga pendapat tersebut, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa besarnya pendapatan yang diterima oleh suatu negara ataupun daerah sangat berpengaruh terhadap besarnya pengeluaran atau belanja yang dikeluarkan oleh negara atau daerah tersebut. Dalam penelitian ini teori yang digunakan sebagai dasar pemikiran adalah teori konsumsi dari Keynes karena teori ini sangat mampu untuk bisa menjawab dari semua rumusan masalah yang telah disebutkan. Teori Keynes menyebutkan bahwa besarnya konsumsi yang dikeluarkan oleh suatu rumah tangga/daerah sangat bergantung pada jumlah penerimaan atau pendapat yang diterima oleh rumah tangga/daerah tersebut. Semakin tinggi tingkat penerimaan atau pendapatan yang diterima maka akan semakin tinggi pula jumlah konsumsi yang bisa dilakukan.

2.2. Otonomi Daerah

2.2.1. Pengertian Otonomi Daerah

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada definisi normatif dalam UU No 32 Tahun 2004, maka unsur otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom. Ketiga hal tersebut dimaksudkan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam UU No 32 Tahun 2004 yang dimaksud hak dalam konteks otonomi daerah adalah hak-hak daerah yang dijabarkan dalam Pasal 21 dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
2. Memilih pimpinan daerah
3. Mengelola aparatur daerah
4. Mengelola kekayaan daerah
5. Memungut pajak dan retribusi daerah
6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Menurut Bastian (2001) perspektif ke depan dari sistem keuangan daerah adalah mewujudkan sistem perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mencerminkan tugas kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah yang transparan, memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat serta mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, mengurangi kesenjangan antar daerah dalam kemampuannya untuk membiayai tanggung jawab otonominya serta memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau

daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.

2.2.2. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan utama dari kebijakan otonomi daerah adalah meringankan beban pemerintahan pusat dari urusan-urusan domestik atau urusan-urusan daerah. Pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan proses pemberdayaan. Secara khusus, tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Selain itu juga bertujuan untuk mengefisiensikan dan mengefektivkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah agar lebih baik lagi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, membangun kestabilan politik dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan, dan juga meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

2.3. Belanja Modal

Menurut Permendagri 13 Tahun 2006, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Besaran nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja modal adalah belanja yang dikeluarkan pemerintah untuk pembelian barang-barang yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Belanja modal juga merupakan salah satu komponen belanja langsung dalam APBN/APBD. Tujuan dari dikeluarkannya belanja modal adalah untuk membiayai pembangunan daerah, seperti:

- Belanja modal pengadaan tanah
- Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor
- Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor
- Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan di air bermotor
- Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan di air tidak bermotor
- Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan udara
- Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel
- Belanja modal pengadaan tanah
- Belanja modal pengadaan peralatan kantor
- Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor
- Belanja modal pengadaan alat-alat studio
- Belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi
- Belanja modal pengadaan alat-alat ukur
- Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran
- Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium
- Belanja modal pengadaan alat-alat persenjataan/keamanan
- Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
- Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan
- Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air
- Belanja modal pengadaan computer
- Belanja modal pengadaan peralatan dapur
- Belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga
- Belanja modal pengadaan instalansi listrik dan telepon
- Belanja modal pengadaan penerangan jalan, taman, dan hutan kota
- Belanja modal pengadaan buku/kepuustakaan

- Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan
- Belanja modal pengadaan hewan/ternak dan tanaman
- Belanja modal pengadaan barang bercorak kesenian dan kebudayaan

Sumber pendanaan dana modal berasal dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendanaan daerah bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
2. Dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus.
3. Lain-lain pendapatan yang sah meliputi hasil kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Sementara untuk pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengalokasian dana yang bersumber dari pendapatan dan pembiayaan daerah kepada belanja daerah ditentukan oleh kebutuhan daerah sendiri atas kebutuhan belanja daerahnya.

2.4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang didapatkan oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bisa didapatkan dari pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh setiap

daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan yang sah (Mardiasmo, 2002). Untuk mencapai tingkat kemandirian keuangan daerah yang baik maka diperlukan tingkat PAD yang tinggi pula. Hal tersebut dikarenakan tingginya Pendapatan Asli Daerah suatu daerah menggambarkan kemandirian daerah sebagai wujud dari adanya otonomi daerah, sehingga nantinya tingkat ketergantungan pemerintah daerah akan bantuan dari pemerintah pusat akan berkurang.

Dalam era otonomi saat ini, setiap daerah dituntut untuk mencari inovasi atau alternatif lain yang dapat dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan pendapatannya dalam membiayai semua aktivitas di daerah. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah yang digunakan untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana daerah. Dengan adanya penyediaan sarana dan prasarana daerah yang baik tentunya akan memberikan dampak yang baik pada kesejahteraan masyarakat dan masyarakat yang sejahtera pasti akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang akan meningkat.

Peningkatan ekonomi masyarakat akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah diantaranya penerimaan pajak dan retribusi daerah dari usaha masyarakat. Semakin tinggi nilai Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi pula besaran dana yang kembali dan dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana publik yang kembali lagi berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang akan meningkatkan nilai Pendapatan Asli Daerah. Apabila nilai Pendapatan Asli Daerah tinggi maka daerah akan mampu mencukupi biaya belanja

modalnya sendiri tanpa harus bergantung bantuan dari pemerintah pusat, dengan demikian proses percepatan pembangunan dan penyediaan fasilitas publik dapat segera dilaksanakan. Menurut Mardiasmo (2002), terdapat 3 kategori yang masuk dalam Pendapatan Asli Daerah, yaitu:

1. Pajak daerah oleh banyak pihak dipandang sebagai jenis penghasilan utama yang diterima oleh setiap daerah. Pada banyak negara, legislasi juga menentukan batasan bagi pungutan tersebut dan juga memberikan kekuasaan kepada pemerintah pusat untuk memeriksa dan mengesahkannya.
2. Pendapatan Asli Daerah berupa berupa pungutan biaya (*fee*), denda (*finer*), dan lisensi (*license*). Sumber pendapatan ini terikat dengan kemauan seseorang untuk membayar pelayanan tertentu yang dinikmatinya. Pemerintah daerah memungut biaya atas beragam pelayanan dan lisensi yang disediakan. Salah satu contoh yang termasuk dalam kategori ini adalah hak untuk menjual minuman, makanan, hiburan, untuk menjalankan sepeda, kendaraan bermotor, untuk menggunakan fasilitas atau taman kota, memancing, menjajakan, dan lain sebagainya.
3. Pendapatan Asli Daerah berupa penghasilan dari utilitas dan perusahaan daerah (*earnings from utilities and public enterprises*). Perusahaan daerah memperoleh penghasilan melalui pembebanan biaya (*user charge*) atas pelayanan yang diberikannya.

2.4.1. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan bersifat dapat dipaksakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dari definisi tersebut sudah jelas bahwa pajak daerah merupakan iuran kepada pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Lahirnya UU No. 18 Tahun 1997 yang telah diamandemen menjadi UU No. 34 Tahun 2000 merupakan landasan hukum bagi pemerintah dalam mengeluarkan peraturan daerah untuk memungut pajak dan retribusi di daerah masing-masing.

2.5. Dana Perimbangan

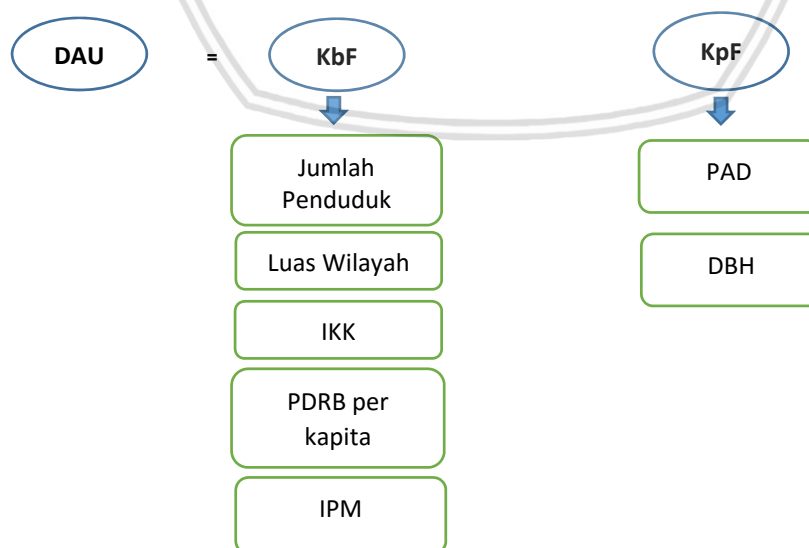
Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan dana APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Kuncoro, 2014). Menurut Widjaja (2002), Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Ketergantungan keuangan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat disebabkan oleh ketidakseimbangan fiskal (*fiscal imbalance*) yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah, kecuali Provinsi DKI Jakarta. Padahal sebenarnya bantuan dana dari pemerintah pusat bertujuan untuk merangsang daerah agar lebih bisa meningkatkan sumber penerimaan PAD. Menurut UU No. 25 Tahun 1999 pasal 6 dan UU No. 33/2004 pasal 10 Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil yang terdiri atas PBB, BPHTB, PPh orang pribadi dan SDA. Berikut uraian dari masing-masing jenis dana perimbangan ini.

2.5.1. Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya untuk melaksanakan desentralisasi. Menurut UU tersebut besarnya Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari APBN. Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi ditetapkan sebesar 10% dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sebesar 90% dari Dana Alokasi Umum.

Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Alokasi dasar dihitung berdasarkan realisasi gaji Pegawai Negri Sipil Daerah (PNSD) tahun sebelumnya (t-1) yang meliputi gaji pokok dan tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan pembayaran gaji PNS yang telah ditetapkan.

Gambar 2.1. Skema DAU berdasarkan UU No. 33/2004 Pasal 28



Sumber: Kuncoro (2014)

Di mana:

AD = Alokasi Dasar (realisasi gaji PNSD tahun sebelumnya)

CF = Celah Fiskal (kebutuhan fiskal – kapasitas fiskal)

Kebutuhan fiskal diukur dengan variabel:

- Besarnya jumlah penduduk yang menunjukkan kebutuhan masyarakat pada penyediaan pelayanan publik di setiap daerah,
- Luas wilayah yang menunjukkan kebutuhan masyarakat pada penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah,
- Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesulitan geografis yang dinilai atas dasar tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah,
- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang menunjukkan besarnya potensi dan aktivitas perekonomian suatu daerah yang dihitung dari total seluruh *output* produksi kotor dalam suatu wilayah,
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menunjukkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan.

Sementara itu, Kapasitas Fiskal diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Rumus hitung Kebutuhan Fiskal:

$$\text{KbF} = \text{TBR} (\alpha_1 \text{IP} + \alpha_2 \text{IW} + \alpha_3 \text{IPM} + \alpha_4 \text{IKK} + \alpha_5 \text{IPDRB/kap})$$

Di mana:

KbF = Kebutuhan Fiskal

α	= bobot variabel
TBR	= Total belanja rata-rata APBD
IW	= Indeks luas wilayah
IPM	= Indeks pembangunan manusia
IPDRB/kap	= Indeks produk domestik regional bruto per capital

Rumus hitung Kapasitas Fiskal:

$$KpF = PAD + DBH_{pajak} + DBH_{SDA}$$

Di mana:

KpF	= Kapasitas fiskal
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
DBH_{pajak}	= Dana bagi hasil dari sektor pajak
DBH_{SDA}	= Dana bagi hasil dari sektor sumber daya alam

Setelah perhitungan sudah selesai, maka terdapat beberapa beberapa situasi atau keadaan antara lain:

- CF > 0 maka daerah akan menerima DAU sejumlah alokasi dasar + celah fiskal.
- CF = 0 maka daerah akan menerima DAU sejumlah alokasi dasar.
- CF < 0 maka daerah akan menerima DAU sejumlah alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah fiskalnya.
- CF negatif \geq AD maka daerah tidak akan menerima DAU.

2.5.2. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus dari daerah tersebut, termasuk yang berasal dari dana reboisasi. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN yang berarti besaran Dana Alokasi Khusus tidak dapat dipastikan setiap tahunnya. Yang termasuk dalam kebutuhan khusus antara lain seperti kebutuhan yang tidak termasuk dalam perhitungan rumus Dana Alokasi Umum, dan/atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Penerimaan negara yang berasal dari dana reboisasi sebesar 40% disediakan kepada daerah penghasil sebagai Dana Alokasi Khusus. Tujuan dari penggunaan Dana Alokasi Khusus dapat diarahkan pada upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dikarenakan besarnya tingkat kemiskinan yang ada di daerah.

2.5.3. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dalam upaya untuk mengatasi kurangnya sumber penerimaan pajak, pemerintah mengeluarkan UU No. 25 Tahun 1999 pasal 6 dan UU No. 32 Tahun 2004 pasal 12 yang berisi mengenai penyediaan Dana Bagi Hasil yang dibagi berdasarkan persentase tertentu bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain itu, penerimaan negara yang dibagihasilkan terdiri atas 2 jenis (Kuncoro, 2014), antara lain:

1. Penerimaan Pajak, yang terdiri dari:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
 - b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

- c. PPh Orang Pribadi.
2. Penerimaan Bukan Pajak (SDA) yang meliputi:
- a. Sektor Kehutanan.
 - b. Sektor Pertambangan Umum.
 - c. Sektor Minyak Bumi dan Gas Alam.
 - d. Sektor Perikanan.

Dana Bagi Hasil dari PPh baik PPh 21 maupun PPh pasal 25/29 orang pribadi, ditetapkan 20% dari jumlah penerimaan. 20% dana bagi hasil tersebut terdiri dari 8% bagian propinsi dan 12% bagian kabupaten/kota. Sementara itu, bagian daerah dari PBB ditetapkan sebesar 90%, sisanya merupakan bagian untuk pemerintah pusat. Dari bagian 90% tadi, 10%nya merupakan bagian upah pungut dan sebagiannya bagian milik pemerintah pusat (Mardiasmo, 2014). Untuk masalah BPHTB, dalam UU No. 23 Tahun 2014 telah ditetapkan sebesar 80%, sedangkan sisanya merupakan bagian untuk pemerintah pusat. Dalam UU yang sama juga telah diatur tentang besarnya bagian daerah yang bersumber dari penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) minyak bumi dan gas alam (migas) yang masing-masingnya ditetapkan 15% dan 30%, dan untuk penerimaan SDA pertambangan umum, kehutanan dan perikanan ditetapkan masing-masing sebesar 80%.

2.6. Hubungan Pendapatan dan Belanja

Untuk memahami sejauh mana penerimaan berpengaruh terhadap pengeluaran perlu dilakukan pengkajian yang mendalam tentang sumber-sumber pendapatan dan belanja daerah yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan daerah. Sumber-sumber tersebut bisa berasal dari PAD, Dana Perimbangan maupun sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tuasikal (2008), menunjukkan bahwa DAU, DAK, PAD dan PDRB berpengaruh terhadap belanja modal. Secara parsial hasil penelitian menunjukkan DAU, DAK, dan PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal di daerah kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian yang dilakukan Nuarisa juga menyebutkan bahwa PAD berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal, dan variabel DAK berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Haryanto (2013) dalam penelitian juga menyebutkan bahwa PAD, DAU, DAK secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur.

Belanja modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada public. Sehingga pemerintah pusat memberikan kegiatan atau program yang lebih banyak kepada pemerintah daerah agar program tersebut mensejahterakan dan memajukan daerah.

2.7. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Judul, Tahun	Tujuan	Hasil	Keterangan
1.	Julitawati dkk, Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Aceh, 2012	Untuk menguji pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kab/Kota di Provinsi Aceh	PAD dan Dana Perimbangan secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Kab/Kota Provinsi Aceh	Perbedaan penelitian ini dan penelitian penulis ada pada variabel independennya yaitu Dana Perimbangan, juga variabel dependennya yaitu kinerja keuangan pemerintah. Perbedaanya ada pada pemilihan sampel dan metode analisis.

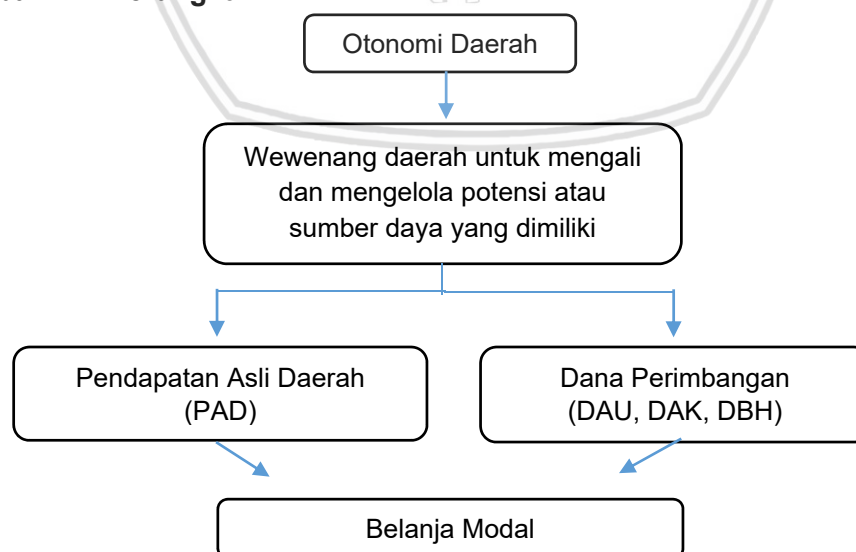
No	Penulis, Judul, Tahun	Tujuan	Hasil	Keterangan
2.	Tuasikal, Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Indonesia, 2008	Untuk mengetahui pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB terhadap Belanja Modal pemerintah daerah di Indonesia	DAU, DAK, PAD dan PDRB secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan PDRB secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal	Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Perbedaannya terletak pada variabel independennya yaitu DAK dan PDRB. Perbedaan lainnya terletak pada pemilihan sampel penelitian
3.	Wandira, Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal, 2013	Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap pengalokasian belanja modal pada pemerintah provinsi se-Indonesia baik secara parsial maupun simultan	DAU dengan arah negatif, DAK dan DBH terhadap belanja modal, PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal	Penelitian berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Perbedaannya terletak pada variabel independennya yaitu DAK dan DBH. Perbedaan lain terletak pada pemilihan sampel penelitian
4.	Nuarisa, Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Pengalokasian Belanja Modal, 2013	Untuk menguji pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap pengalokasian belanja modal	PAD, DAU dan DAK secara keseluruhan berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal	Penelitian ini berbeda dari penelitian yang akan dilakukan peneliti. Perbedaannya terletak pada variabel independen yaitu DAK. Perbedaan lainnya terletak pada metode penelitian yaitu documenter, dan pemilihan sampel penelitian

No	Penulis, Judul, Tahun	Tujuan	Hasil	Keterangan
5.	Haryanto, Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa di Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur (2006-2012), 2013	Untuk menganalisis pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap belanja modal dan belanja barang dan jasa di kab/kota di Provinsi Jawa Timur	Secara simultan PAD, DAU dan DAK berpengaruh terhadap belanja modal dan belanja barang dan jasa. Secara parsial PAD dan DAU berpengaruh, namun DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal dan belanja barang dan jasa	Penelitian berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Perbedaannya terletak pada variabel independennya yaitu DAK, dan variabel dependennya yaitu belanja barang dan jasa. Perbedaan lainnya terletak pada pemilihan sampel penelitian

2.8. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam suatu penelitian sangat diperlukan untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Dengan adanya kerangka pikir, peneliti dapat menentukan alur pemikiran dari awal penelitian hingga hasil yang ingin dicapai. Berikut ini alur pemikiran dalam penelitian ini seperti pada gambar 2.2 berikut:

Gambar 2.2. Kerangka Pikir



Seperti terlihat pada gambar 2.2 di atas maka penulis akan menjelaskan tentang gambaran tentang bagaimana kerangka pikir itu dibuat. Adanya otonomi daerah yang telah dilaksanakan sejak tahun 2001 dengan dasar UU No. 22 Tahun 1999 dan kemudian diperbaharui menjadi UU No. 34 Tahun 2004 yang juga diperbaharui lagi menjadi UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang berisi mengenai wewenang daerah dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya/daerahnya sendiri, dimana dengan adanya undang-undang tersebut membuat seluruh daerah di Indonesia harus bisa mengatur segala kepentingan daerahnya masing-masing. Setiap daerah diberikan wewenang untuk mengelola dan mengembangkan kemampuan atau sumber daya yang dimiliki guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka proses pembangunan daerah yang selanjutnya disebut belanja daerah.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, setiap daerah diwajibkan untuk mengatur dan mengelola sumber keuangannya sendiri dengan memaksimalkan pada perolehan Pendapatan Asli Daerahnya. Disisi lain, pemerintah pusat memberikan bantuan berupa dana perimbangan kepada daerah untuk mengurangi ketimpangan antar daerah karena setiap daerah memiliki potensi/kemampuan yang berbeda. Dana perimbangan yang pemerintah pusat berikan terbagi dalam 3 bagian yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Untuk bisa mencapai keberhasilan dalam otonomi daerah, PAD, DAU, DAK dan DBH harus dialokasikan untuk kegiatan yang sangat penting seperti untuk membiayai belanja modal yang bisa memberikan dampak langsung pada penyediaan layanan masyarakat yang nantinya juga akan bisa meningkatkan PAD. Misalnya

digunakan untuk membiayai belanja modal dalam program pengurangan kemiskinan, maka orang miskin jumlahnya akan berkurang dan jumlah wajib pajak semakin bertambah. Dengan demikian tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan kemudian masyarakat akan mampu membayar pajak dengan presentase yang lebih banyak dari sebelumnya. Dengan adanya hal itu maka secara tidak langsung akan mampu meningkatkan PAD, dan pada akhirnya akan mampu untuk membiayai seluruh kebutuhannya sendiri dengan dana yang dimiliki yang bersumber dari PAD dan bisa mengurangi ketergantungan bantuan dari pemerintah. Dengan demikian kemandirian keuangan daerah dapat tercapai sebagai salah bentuk keberhasilan dari otonomi daerah.

2.9. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Adapun hipotesis penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- H_1 : Pendapatan Asli Daerah diduga berpengaruh terhadap belanja modal di daerah Malang Raya pada tahun 2007-2016.
- H_2 : Dana Alokasi Umum diduga berpengaruh terhadap belanja modal di daerah Malang Raya pada tahun 2007-2016.
- H_3 : Dana Alokasi Khusus diduga berpengaruh terhadap belanja modal di daerah Malang Raya pada tahun 2007-2016.
- H_4 : Dana Bagi Hasil diduga berpengaruh terhadap belanja modal di daerah Malang Raya pada tahun 2007-2016.

H₅ : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal di daerah Malang Raya pada tahun 2007-2016.



BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab 3 ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional, metode analisis data, analisis regresi, serta pengujian hipotesis.

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan adalah penelitian kuantitatif dikarenakan hasil yang nantinya dihasilkan berupa angka. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal di wilayah Malang Raya meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif karena nantinya hasil yang diperoleh berupa angka. Dari angka hasil perhitungan tersebut selanjutnya akan dianalisis lebih dalam lagi berupa analisis data. Di dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel yaitu variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Variabel dependen (terikat) yang digunakan adalah belanja modal, dan untuk variabel independen (bebas) yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

3.2. Populasi Penelitian

Populasi merupakan suatu wilayah yang terdiri dari subjek atau objek yang mempunyai ciri atau karakteristik tertentu yang ditentukan dalam penelitian untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Populasi tidak selalu dalam wujud manusia, populasi juga bisa dalam bentuk obyek atau barang-barang. Dari pengertian tersebut, populasi dalam penelitian ini adalah wilayah Malang Raya meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu tahun 2007-2016.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara utama dalam sebuah penelitian. Pengumpulan data bisa dilakukan dalam berbagai cara dan dari berbagai sumber. Tujuan dari pengumpulan data adalah untuk bisa mendapatkan data yang nantinya bisa diolah. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi tidak langsung

Teknik ini dilakukan dengan cara mencari data langsung dalam *website* dari sumber data yang diteliti yaitu www.djpk.depkeu.go.id dan www.bps.go.id sehingga diperoleh data realisasi APBD serta gambaran mengenai subjek penelitian.

2. *Library research* (studi kepustakaan)

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari teori-teori dan juga konsep yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Teori-teori dan konsep tersebut didapat dari buku-buku, jurnal, serta artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Jenis data dalam penelitian ini bersifat data panel yang merupakan gabungan antara data *time series* (antar waktu) dan data *cross section* (antar individu/ruang) (Gujarati, 2003). Kelebihan dari data panel adalah mampu menyediakan jumlah data yang lebih banyak, dan juga data panel mampu mengatasi masalah yang timbul akibat adanya penghilangan variabel. Data yang digunakan berupa laporan realisasi APBD Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu tahun 2007-2016.

2. Sumber Data

Seluruh data dalam penelitian ini bersumber dari *website* resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Departemen Keuangan dan juga Badan Pusat Statistik (BPS).

3.5. Definisi Operasional Variabel

3.5.1. Definisi Variabel

1. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau variabel yang menjadi akibat dari adanya variabel lainnya (variabel bebas). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Belanja Modal di daerah Malang Raya. Belanja Modal merupakan belanja yang diperuntukkan membeli barang-barang yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan dalam proses pembangunan daerah. Indikator Belanja Modal dapat diukur dengan:

Belanja Modal = belanja tanah + belanja peralatan dan mesin + belanja gedung dan bangunan + belanja jalan, irigasi, dan jaringan + belanja asset lainnya

2. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas (*independen*) merupakan variabel yang memengaruhi atau menyebabkan munculnya variabel terikat (*dependen*). Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian adalah;

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang didapatkan oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, pendapatan dari laba perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Indikator Pendapatan Asli Daerah dapat diukur dengan:

$$\text{PAD} = \text{pajak daerah} + \text{retribusi daerah} + \text{laba perusahaan daerah} + \text{lain-lain pendapatan yang sah}$$

b. Dana Alokasi Umum (DAU) (X2)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya untuk melaksanakan desentralisasi.

c. Dana Alokasi Khusus (X3)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus dari daerah tersebut, termasuk yang berasal dari dana reboisasi. Yang termasuk dalam kebutuhan khusus antara lain seperti kebutuhan yang tidak termasuk dalam

perhitungan rumus DAU, dan/atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

d. Dana Bagi Hasil (X4)

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999 pasal 6 dan UU No. 33 Tahun 2004 pasal 12 yang berisi mengenai penyediaan dana bagi hasil yang dibagi berdasarkan persentase tertentu bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. DBH bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3.5.2. Operasional Variabel

Tabel 3.1. Operasional Variabel

Variabel	Data	Satuan
Belanja Modal (Y)	Data realisasi APBD Belanja Modal yang didapat dari <i>website</i> DJPK Kementerian Keuangan	Rupiah
PAD (X1)	Data realisasi APBD PAD yang didapat dari <i>website</i> DJPK Kementerian Keuangan	Rupiah
DAU (X2)	Data realisasi APBD DAU yang didapat dari <i>website</i> DJPK Kementerian Keuangan	Rupiah
DAK (X3)	Data realisasi APBD DAK yang didapat dari <i>website</i> DJPK Kementerian Keuangan	Rupiah

Variabel	Data	Satuan
DBH (X4)	Data realisasi APBD DBH yang didapat dari <i>website</i> DJPK Kementerian Keuangan	Rupiah

Sumber: Data diolah DJPK, 2007-2016

3.6. Metode Analisis

3.6.1. Regresi Data Panel

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data PAD, DAU, Belanja Modal Kota Malang tahun 2007-2016. Data ini merupakan kumpulan data *time series* dan *cross section* yaitu berisi 5 variabel yaitu PAD, DAU, DAK, DBH, dan Belanja Modal daerah Malang Raya meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu dalam kurun waktu selama 10 tahun mulai dari tahun 2007-2016. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian adalah data panel.

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan statistik linier berganda (*Mulltiple Regression*) untuk data panel. Tujuan dari penggunaan teknik ini adalah untuk menguji hipotesis penelitian yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Model regresi data panel ini menggunakan variable dependen Belanja Modal (BM) (Y), dan variable independen adalah PAD (X1), DAU (X2), DAK (X3), dan DBH (X4). Apabila ditulis dalam suatu bentuk fungsi, maka formula regresinya adalah sebagai berikut:

$$BM = f(PAD, DAU, DAK, DBH)$$

Kemudian model regresi tersebut bisa dinyatakan dalam bentuk linier seperti berikut ini:

$$BM_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + \beta_4 DBH_{it} + e_t$$

Di mana:

BM = Belanja Modal

β_0 = konstanta

i = daerah ke

t = tahun pengujian (2007, 2008, 2009, ..., 2016)

β_1 = koefisien regresi PAD

β_2 = koefisien regresi DAU

β_3 = koefisien regresi DAK

β_4 = koefisien regresi DBH

e = kesalahan pengganggu (*error of term*)

Uji signifikansi variabel bebas dilihat dengan melihat tabel hasil regresi. Jika nilai probabilitasnya di bawah $\alpha = 5\%$, maka variabel bebas tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

3.6.2. Pemilihan Model

Sebelum melakukan analisis data panel, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Tahap pertama adalah tahap memilih model estimasi, yang dimana terdapat 3 model yang digunakan untuk menganalisis data panel. Ketiga model tersebut ialah *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*. Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai 3 model dalam penelitian data panel, yaitu:

1. *Common Effect*

Menurut Widarjono (2009), *common effect* merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* dan menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel tersebut. Pada model ini tidak dapat membedakan varians antara silang tempat dan waktu karena memiliki *intercept* yang tetap dan bukan bervariasi secara *random*. Model ini mengasumsikan bahwa perilaku antar variabel adalah sama dalam semua kurun waktu

2. *Fixed Effect*

Menurut Gujarati (2012) *fixed effect* merupakan model dengan *intercept* yang berbeda untuk setiap subjeknya (*cross section*), akan tetapi *slope* setiap subjek tidak berubah seiring waktu. Model estimasi ini sering disebut dengan teknik *Least Square Dummy Variable* (LSDV).

3. *Random Effect*

Random Effect merupakan model yang akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Model ini mengestimasi data panel yang variabel residual diduga memiliki hubungan antar waktu dan subjek. Model ini disebut juga *Error Components Model* (ECM) karena residual terdiri dari 2 komponen.

Dalam memilih model estimasi, hal yang harus dilakukan adalah menentukan uji signifikansi model berdasarkan penentuan metode estimasi yang dipilih. Uji signifikansi model ini dilakukan untuk menguji masing-masing model seperti berikut:

1. Uji signifikansi model *fixed effect* atau *common effect*

Uji signifikansi ini dilakukan untuk menentukan model mana yang paling baik diantara *fixed effect* atau *common effect*. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji Chow yang merupakan uji perbedaan dua model regresi dengan menggunakan statistic uji F. Hipotesis yang dibentuk dalam uji Chow adalah:

H_0 : Model *common effect*

H_1 : Model *fixed effect*

H_0 ditolak apabila *P-value* lebih kecil dari nilai α . Sebaliknya jika H_0 diterima apabila *P-value* lebih besar dari α . Besarnya nilai α adalah sebesar 5%.

2. Uji signifikansi model *fixed effect* atau *random effect*

Uji signifikansi ini dilakukan untuk menentukan model mana yang paling baik antara model *fixed effect* atau *random effect*. Pengujian ini dilakukan dengan cara menggunakan uji Hausman yang merupakan pengujian statistic yang menggunakan uji H yang mengikuti distribusi *chi-square* dengan derajat bebas sebesar jumlah variabel bebasnya. Hipotesis yang dibentuk dalam uji Hausman adalah:

H_0 : model *random effect*

H_1 : model *fixed effect*

H_0 ditolak apabila *P-value* lebih kecil dari nilai α , sebaliknya H_0 diterima apabila *P-value* lebih besar dari α . Besarnya nilai α yang digunakan adalah sebesar 5%.

3. Uji *Lagrange Multiplier*

Uji *Lagrange Multiplier* (LM Test) berguna untuk memilih apakah model *Pooled Least Square* (PLS) atau *Random Effect*. Hipotesis dalam uji *Lagrange Multiplier* (LM Test) adalah sebagai berikut:

H_0 : Model *common effect*

H_1 : Model *random effect*

3.6.3. Uji Asumsi Klasik

Setelah pemilihan model, selanjutnya adalah melakukan uji asumsi klasik. Pengujian ini terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi. Tetapi dalam penelitian data panel, tidak semua uji asumsi klasik harus dimasukkan dalam regresi linier berganda dengan pendekatan OLS. Autokorelasi dan Normalitas tidak diujikan dalam regresi data panel karena Autokorelasi hanya terjadi pada data *time series*. Sehingga dalam penelitian ini uji asumsi klsaik yang digunakan adalah uji Multikolinieritas dan Heteroskedatisitas. Berikut penjelasan tentang 2 uji yang akan dilakukan:

1. Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas. Cara yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dalam model regresi ini adalah dengan melihat nilai VIF. Jika nilai VIF kurang dari sama dengan 10 maka penelitian ini bebas dari multikolinieritas, dan jika nilai VIF lebih dari 10 maka dalam penelitian terdapat masalah multikolinieritas (Ghozali, 2011).

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan mendeteksi apakah terjadi heteroskedastisitas yang ditandai dengan varian residual dalam model regresi. Masalah heteroskedastisitas akan mengakibatkan pengambilan keputusan menjadi

tidak valid. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan uji *Glejser*.

Hipotesis dari uji *Glejser* adalah:

- Jika nilai $n.R^2 > \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak (tidak terjadi heteroskedastisitas)
- Jika nilai $n.R^2 < \alpha = 0,05$ maka H_1 diterima (terjadi heteroskedastisitas)

3. Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Jika tingkat signifikasinya $< \alpha = 0,05$ berarti data normal. Pengujian ini dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal.

4. Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Apabila terjadi korelasi, maka disebutkan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu dengan yang lainnya. Untuk bisa mendeteksi ada atau tidak autokorelasi adalah uji *Breusch-Godfrey*.

3.6.4. Uji Hipotesis

1. Uji F

Uji F-statistik adalah pengujian yang bertujuan untuk melihat pengaruh semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hasil uji signifikansi simultan ini bisa dilihat dari nilai F-hitung lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Jika F-hitung $>$ F-tabel atau probabilitas F-statistik $< \alpha$, maka

variabel bebas dalam model secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat.

2. Uji t

Uji t adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan terhadap koefisien regresi secara individual. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t-hitung dan t-tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing t-hitung. Apabila nilai probabilitasnya nilai statistic $t < \text{derajat kepercayaan } (\alpha = 5\%)$ maka variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini adalah uji untuk melihat berapa besar kemampuan variabel bebas secara serentak memberi penjelasan terhadap variabel terikat. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1 ($0 < R^2 < 1$). Koefisien determinasi berguna untuk menguji kekuatan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Wilayah Malang Raya merupakan salah satu wilayah dari sembilan Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) yang direncanakan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi Jawa Timur. SWP tersebut terdiri atas Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.

4.1.1. Kota Malang

Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota Malang terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya, dan termasuk kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Kota Malang berada di dataran tinggi sehingga udara terasa sejuk. Kota Malang merupakan salah satu bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya bersama dengan Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan, kota industri, dan kota pariwisata.

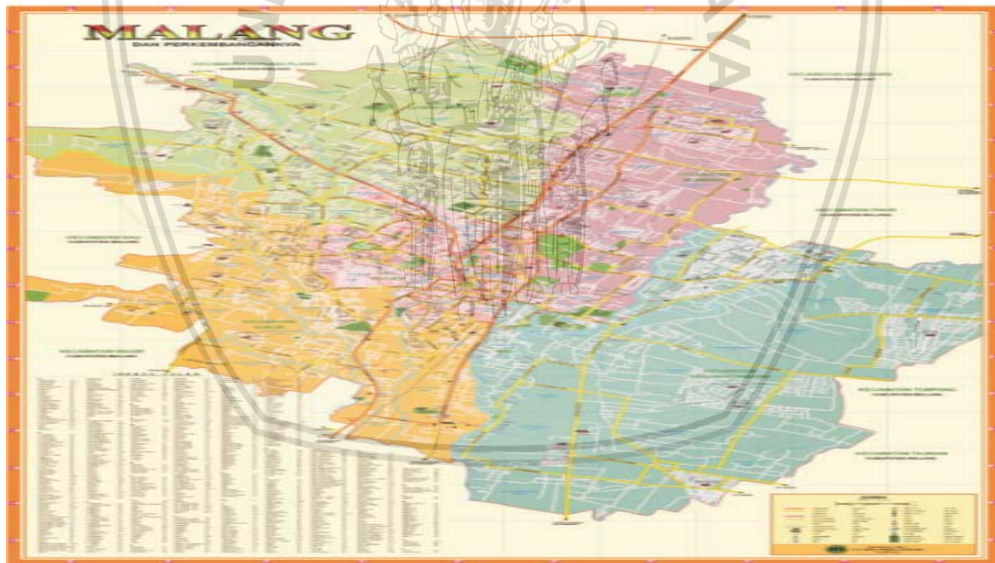
Kota Malang terletak pada ketinggian antara 440-667 meter diatas permukaan air laut. Kota Malang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang yang secara astronomis terletak $112,06^{\circ}$ - $112,07^{\circ}$ bujur timur dan $7,06^{\circ}$ - $8,02^{\circ}$ lintang selatan. Berdasarkan letak geografis, Kota Malang terletak pada $7^{\circ} 16'$ lintang utara dan $112^{\circ} 43'$ bujur timur. Kota Malang memiliki luas wilayah sebesar $110,06 \text{ km}^2$ dengan jumlah penduduk sebanyak 857.891 jiwa, dengan demikian kepadatan jumlah penduduk sebesar 7800 jiwa/ km^2 . Kota Malang terdiri atas lima kecamatan antara lain

Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Sukun, dan Kecamatan Lowokwaru. Batas-batas wilayah Kota Malang antara lain:

- Sebelah utara, berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso.
- Sebelah timur, berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang.
- Sebelah selatan, berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan dan Kecamatan Pakisaji.
- Sebelah barat, berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau.

Berikut adalah peta Kota Malang:

Gambar 4.1. Peta Kota Malang



Sumber: malangkota.go.id

Dari sisi ekonomi, jumlah penerimaan daerah kota Malang dari tahun 2007-2016 cenderung mengalami peningkatan di setiap tahunnya, dalam penelitian ini pendapatan yang akan dibahas adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana

Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Hal tersebut juga diikuti dengan meningkatnya jumlah belanja modal di Kota Malang. Hal tersebut bisa dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1. Data Realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Modal Kota Malang Tahun 2007-2016 (dalam milyar rupiah)

Tahun	PAD	DAU	DAK	DBH	Belanja Modal
2007	87,115,7	417,300,0	56,934,0	63,133,8	149,646,8
2008	83,403,6	473,050,5	51,782,0	74,579,8	152,465,4
2009	92,476,4	471,739,2	50,597,0	106,637,0	226,717,5
2010	113,490,0	494,911,0	47,477,0	123,635,0	195,134,0
2011	129,794,4	444,576,6	44,673,7	66,851,2	225,176,0
2012	162,860,0	454,940,0	46,569,0	88,027,0	267,895,0
2013	271,094,0	522,239,0	49,095,0	54,069,0	301,453,0
2014	272,545,0	608,448,0	61,304,0	116,944,0	318,462,0
2015	324,938,8	618,758,9	60,590,6	87,015,10	337,647,6
2016	327,541,6	659,678,2	94,813,8	114,874,4	293,667,2

Sumber: DJPK, data diolah, 2018

Dari data pada tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang selalu mengalami peningkatan, hanya pada tahun 2008 menurun dari tahun sebelumnya dari Rp 87,115,7 Milyar menjadi Rp 83,403,6 Milyar. Realisasi Dana Alokasi Umum Kota Malang juga selalu mengalami peningkatan mulai dari tahun 2007-2016. Realisasi Dana Alokasi Khusus berfluktuasi mulai dari tahun 2007-2016. Dana Bagi Hasil juga berfluktuasi dan terdapat pada beberapa tahun kenaikan dan penurunan Dana Bagi Hasil bersifat berubah secara drastis jika dibandingkan dengan 3 variabel independen lainnya, yaitu pada tahun 2009 meningkat dari tahun sebelumnya dari Rp 74,579,8 Milyar menjadi Rp 106,637,0

Milyar, juga pada tahun 2011 juga menurun drastis dari tahun sebelumnya dari Rp 123,635,0 Milyar menjadi Rp 66,851,2 Milyar, hal tersebut juga terjadi pada tahun 2014, 2015, dan 2016. Realisasi Belanja modal sendiri juga berfluktuasi dari tahun 2007-2016. Pada tahun 2010 belanja modal mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dari Rp 226,717,5 Milyar menjadi Rp 195,134,0 Milyar, dan pada tahun 2016 juga mengalami penurunan dari Rp 337,647,6 Milyar menjadi Rp 293,667,2 Milyar.

4.1.2. Kabupaten Malang

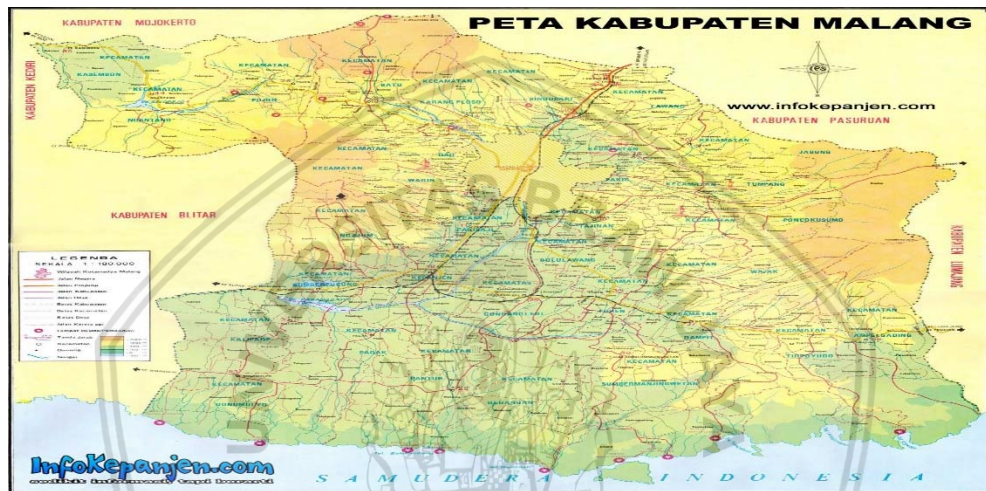
Kabupaten Malang adalah sebuah kawasan yang terletak pada bagian tengah selatan wilayah Propinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan enam kabupaten dan Samudera Indonesia. Sebelah Utara-Timur berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Sebelah Barat Utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Mojokerto. Letak geografis sedemikian itu menyebabkan Kabupaten Malang memiliki posisi yang cukup strategis. Hal ini ditandai dengan semakin ramainya jalur transportasi utara maupun selatan yang melalui Kabupaten Malang dari waktu ke waktu.

Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Malang terletak pada $112^{\circ} 17' 10,90''$ sampai $112^{\circ} 57' 00''$ bujur timur, dan $7^{\circ} 44' 55,11''$ sampai $8^{\circ} 26' 35,45''$ lintang selatan. Kabupaten Malang memiliki luas wilayah sebesar $3.530,65 \text{ km}^2$ dengan jumlah penduduk sebesar 3.092.714 jiwa. Kabupaten terdiri atas 33 kecamatan dengan Ibu Kota Kepanjen. 33 kecamatan tersebut antara lain Ampelgading, Bantur, Bululawang, Dampit, Dau, Donomulyo, Gedangan, Gondanglegi, Jabung, Kalipare, Karangploso,

Kasembon, Kepanjen, Kromengan, Lawang, Ngajum, Ngantang, Pagak, Pagelaran, Pakis, Pakisaji, Poncokusumo, Pujon, Sumbermanjing Wetan, Singosari, Sumberpucung, Tajinan, Tirtoyudo, Tumpang, Turen, Wagir, Wajak, dan Wonosari.

Berikut adalah gambar peta Kabupaten Malang:

Gambar 4.2. Peta Kabupaten Malang



Sumber: infokepanjen.com

Dari sisi ekonomi, jumlah penerimaan daerah Kabupaten Malang dari tahun 2007-2016 cenderung mengalami peningkatan di setiap tahunnya, dalam penelitian ini pendapatan yang akan dibahas adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Hal tersebut juga diikuti dengan meningkatnya jumlah belanja modal di Kabupaten Malang. Hal tersebut bisa dilihat pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2. Data Realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Modal Kabupaten Malang Tahun 2007-2016 (dalam milyar rupiah)

Tahun	PAD	DAU	DAK	DBH	Belanja Modal
2007	84,353,9	880,921,0	68,184,0	64,805,1	375,243,2
2008	100,327,7	967,647,2	89,739,0	77,072,6	331,809,5
2009	153,526,4	1,059,098,7	93,983,0	108,708,1	282,790,5
2010	130,466,0	1,067,107,0	88,659,0	148,456,0	270,554,0
2011	121,130,9	1,074,119,6	72,540,0	85,786,7	325,728,0
2012	375,330,0	1,068,011,0	75,471,0	106,619,0	393,538,0
2013	397,339,0	1,199,362,0	73,694,0	108,379,0	452,837,0
2014	411,185,0	1,572,192,0	130,051,0	129,719,0	501,504,0
2015	461,887,7	1,613,161,8	153,350,4	126,719,0	714,192,9
2016	502,755,0	1,694,884,7	168,164,7	145,219,9	683,932,4

Sumber: DJPK, data diolah, 2018

Dari data pada tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang cenderung selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hanya saja pada tahun 2010 turun dari tahun sebelumnya menjadi Rp 130,466,0 Milyar, dan juga pada tahun 2011 menjadi Rp 121,130,9 Milyar. Realisasi Dana Alokasi Khusus juga selalu meningkat di setiap tahunnya. Dana Alokasi Khusus juga cenderung meningkat, hanya saja mengalami penurunan pada tahun 2011 sampai 2013. Sedangkan Dana Bagi Hasil berfluktuasi dan terdapat pada beberapa tahun mengalami kenaikan dan penurunan. Perubahan Dana Bagi Hasil ini berubah secara drastis jika dibandingkan dengan 3 variabel independen lainnya, yaitu pada tahun 2009 sampai 2012. Realisasi Belanja Modal sendiri juga cenderung meningkat, hanya saja pada tahun 2009 sampai 2010 mengalami penurunan, begitu pula pada tahun

2016 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi Rp 683,932,4 Milyar.

4.1.3. Kota Batu

Pada tanggal 6 Maret 1993, kota administrasi Batu dibentuk dan diresmikan. Batu dibentuk dan diresmikan, karena sebelumnya adalah bagian dari wilayah Kabupaten Malang. Tanggal 10 April 1995 dikirim permohonan surat persetujuan DPRD kabupaten Malang dan Bupati Malang tentang peningkatan status kotif Batu menjadi Kotamadya Batu. Pada tanggal 11 April 1995, pengiriman surat persetujuan kepada pembantu Gubernur di Malang tentang peningkatan status kotif Batu menjadi Kotamadya Batu. Pada tanggal 6 Juni 1996 dengan persetujuan DPR kota Malang, surat persetujuan Bupati dan Pembantu Gubernur di Malang dikirimkan ke Gubernur Jawa Timur. Setelah melalui proses yang sangat panjang tanggal 28 Pebruari 2001 diturunkan surat keputusan Mendagri (Menteri Dalam Negeri) dan Otonomi Daerah. Tanggal 21 Juni 2001 Batu disahkan menjadi kota admistratif berdasarkan UU No. 11 tahun 2001. Dan tanggal 17 Oktober 2001 Batu telah diresmikan menjadi daerah otonom yang berpisah dengan wilayah Kabupaten Malang, yang terdiri dari tiga kecamatan dan 19 desa serta kelurahan

Berdasarkan letak geografis, Kota Batu terletak pada 112° 17' 10,90" sampai 122° 57' 00" bujur timur dan 7° 44' 55,11" sampai 8° 26' 35,45" lintang selatan. Kota Batu memiliki luas wilayah sebesar 136,74 km^2 dengan jumlah penduduk sebanyak 182.392 jiwa. Kota batu memiliki 3 kecamatan yang terdiri atas 5 kelurahan dan 19 desa. Batas-batas wilayah Kota Batu antara lain:

- Sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan.

- Sebelah timur, berbatasan dengan Kecamatan Dau dan Kecamatan Karangploso.
- Sebelah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar.
- Sebelah barat, berbatasan dengan Kecamatan Pujon.

Berikut ini adalah gambar peta Kota Batu:

Gambar 4.3. Peta Kota Batu



Sumber: batukota.go.id

Dari sisi ekonomi, jumlah penerimaan daerah Kota Batu dari tahun 2007-2016 cenderung mengalami peningkatan di setiap tahunnya, dalam penelitian ini pendapatan yang akan dibahas adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Hal tersebut juga diikuti dengan meningkatnya jumlah belanja modal di Kota Batu. Hal tersebut bisa dilihat pada tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3. Data Realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Modal Kota Batu Tahun 2007-2016 (dalam milyar rupiah)

Tahun	PAD	DAU	DAK	DBH	Belanja Modal
2007	14,944,4	188,025,0	26,712,6	23,095,9	99,094,5
2008	18,625,0	215,977,8	30,520,0	27,590,3	99,735,0
2009	17,386,7	218,135,4	33,037,0	34,171,8	143,102,7
2010	57,736,0	247,723,0	18,275,0	42,736,0	97,543,0
2011	70,775,0	290,823,0	17,585,0	51,924,0	60,912,0
2012	77,684,0	270,641,0	25,473,0	67,564,0	82,946,0
2013	99,249,0	374,362,0	25,376,0	62,281,0	110,440,0
2014	100,494,0	412,378,0	30,351,0	59,265,0	136,627,0

Sumber: Data diolah DJPK, 2018

Dari data pada tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Daerah di Kota Batu selalu mengalami peningkatan, hanya saja pada tahun 2009 mengalami penurunan menjadi Rp 17,386,7 Milyar. Realisasi Dana Alokasi Umum juga cenderung meningkat, hanya pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi Rp 270,641,0 Milyar. Realisasi Dana Alokasi Khusus berfluktuasi dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk realisasi Dana Bagi Hasil juga berfluktuasi dari tahun ke tahun, pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi Rp 59,265,0 Milyar dan kenaikan pada tahun 2016 menjadi Rp 51,317,1 Milyar. Sedangkan untuk realisasi belanja modal juga berfluktuasi, mengalami penurunan pada tahun 2010 dan tahun 2011, sedangkan pada tahun 2016 juga mengalami penurunan menjadi Rp 174,368,7 Milyar.

4.2. Analisis data

Analisis data dilakukan dengan metode regresi linier berganda. Jenis data yang diolah adalah data panel yaitu gabungan antara data *time series* dan *cross*

section. Data *time series* dalam penelitian ini adalah data APBD pada tahun 2007-2016, dan data *cross section* dalam penelitian ini adalah data APBD Wilayah Malang Raya yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu sehingga dapat diketahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sebelum melakukan analisis regresi, tahap pertama yang harus dilakukan adalah menentukan model yang akan digunakan dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan *random effect*, *fixed effect*, dan *common effect*.

4.2.1. Pemilihan model

Pemilihan model ini bertujuan untuk mengetahui model mana yang akan digunakan dalam penelitian ini. Pemilihan model yang pertama menggunakan Uji Chow untuk mengetahui model yang digunakan *Common Effect* (*Pooled Least Square*) atau *Fixed effect*. Jika nilai *Chi-square* > alpha 5% (0,05) maka H_0 diterima dan jika nilai *Chi-square* < alpha 5% maka H_0 ditolak.

Tabel 4.4. Hasil Regresi Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: EST

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.956428	(2,23)	0.1642
Cross-section Chi-square	4.713296	2	0.0947

Sumber: Hasil output regresi Eviews

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, hasil regresi Uji Chow diketahui nilai probabilitas *Chi-square* $0,0947 > 0,05$ maka H_0 diterima. Dengan demikian model yang dipilih adalah *Common Effect*. Selanjutnya melakukan pemilihan model dengan melakukan Uji Hausman. Uji Hausman dilakukan untuk memilih model yang digunakan *Random Effect* atau *Fixed Effect*. Jika nilai *P-value* $> \alpha$ 5% (0,05) maka H_0 diterima, dan jika *P-value* $< \alpha$ 5% (0,05) maka H_0 ditolak. Dalam penelitian ini Uji Hausman tidak dapat dilakukan karena dalam pengujian *Random Effect* tidak dapat melakukan estimasi. Hal tersebut dikarenakan jumlah data *cross section* lebih besar dari jumlah variabel yang digunakan. Dengan kata lain jumlah wilayah yang digunakan lebih kecil dari jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang berjumlah 5 variabel, oleh karena itu tidak bisa melakukan pemilihan model menggunakan Uji *Hausman*.

Pemilihan model selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan Uji *Lagrange Multiplier* untuk memilih model yang digunakan *Common Effect* atau *Random Effect*. Jika nilai probabilitas $> \alpha$ 5% (0,05) maka H_0 diterima, jika nilai probabilitas $< \alpha$ 5% (0,05) maka H_0 ditolak.

Tabel 4.5. Hasil Regresi Uji *Lagrange Multiplier*

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects			
Null hypotheses: No effects			
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives			
	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.038088 (0.8453)	2.292065 (0.1300)	2.330153 (0.1269)
*Mixed chi-square asymptotic critical values:			
1%	7.289		
5%	4.321		
10%	2.952		

Sumber: Hasil output regresi Eviews

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas, hasil regresi Uji *Lagrange Multiplier* diketahui nilai probabilitas *Breusch Pagan* $0,1269 > 0,05$ maka H_0 diterima. Dengan demikian model yang dipilih adalah *Common Effect*. Dari ketiga pemilihan model diatas, maka model yang terpilih adalah *Common Effect* seperti pada tabel 4.3 di bawah ini:

Tabel 4.6. Hasil Pemilihan Model Regresi

No	Pengujian	Hasil	Keputusan
1.	Uji <i>Chow</i>	Prob. <i>Chi-square</i> = $0,0947 > 0,05$	<i>Common Effect</i>
2.	Uji <i>Hausman</i>	-	-
3.	Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	Prob. <i>Breusch-Pagan</i> = $0,1296 > 0,05$	<i>Common Effect</i>

4.2.2. Uji Asumsi klasik

Uji asumsi klasik merupakan syarat statistik yang harus dipenuhi. Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini adalah uji Autokorelasi, Multikolinieritas, Heteroskedastisitas, dan Normalitas.

4.2.2.1. Uji Autokorelasi

Untuk melakukan Uji Autokorelasi dilakukan dengan menggunakan metode *Breusch-Godfrey* untuk menentukan error dari model regresi, kemudian meregresikan variabel error menggunakan *autoregressive* kemudian diambil keputusan. Jika nilai Prob. *Chi-square* (2) > alpha 5% (0,05) maka tidak ada masalah autokorelasi.

Tabel 4.7. Hasil Uji Regresi Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.008898	Prob. F(2,23)	0.9911
Obs*R-squared	0.023194	Prob. Chi-Square(2)	0.9885

Sumber: Hasil output regresi Eviews

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas, hasil Uji Autokorelasi menggunakan metode *Breusch-Godfrey* diketahui nilai Prob. *Chi-square* (2) 0,9885 > 0,05. Dengan demikian dalam penelitian ini tidak ada masalah autokorelasi.

4.2.2.2. Uji Multikolonieritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas. Cara yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dalam model regresi ini adalah dengan melihat nilai VIF. Jika nilai VIF kurang dari sama dengan 10 maka penelitian ini bebas dari multikolinieritas, dan jika

nilai VIF lebih dari 10 maka dalam penelitian terdapat masalah multikolinieritas (Ghozali, 2011).

Tabel 4.8. Hasil Uji Regresi Multikolinieritas

Variance Inflation Factors

Date: 05/17/18 Time: 05:50

Sample: 1 30

Included observations: 30

Variable	Coefficient		
	Uncentered	Centered	
	Variance	VIF	VIF
C	509.2029	7.118301	NA
PAD	0.010813	7.580519	2.908285
DAU	0.003528	31.96367	8.994095
DAK	0.481217	35.29003	9.169654
DBH	0.163720	18.17524	2.705289

Sumber: Hasil output regresi Eviews

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, terlihat bahwa semua variable dalam penelitian ini yaitu di bawah 10 untuk nilai VIF. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa diantara variabel independen bebas dari multikolinieritas.

4.2.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan mendeteksi apakah terjadi heteroskedastisitas yang ditandai dengan varian residual dalam model regresi. Masalah heteroskedastisitas akan mengakibatkan pengambilan keputusan menjadi tidak valid. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan uji *Glejser*. Hipotesis dari uji *Glejser* adalah:

- Jika nilai $n.R^2 > \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak (tidak terjadi heteroskedastisitas)
- Jika nilai $n.R^2 < \alpha = 0,05$ maka H_1 diterima (terjadi heteroskedastisitas)

Tabel 4.9. Hasil Uji Regresi Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	1.019954	Prob. F(4,25)	0.4162
Obs*R-squared	4.208916	Prob. Chi-Square(4)	0.3785
Scaled explained SS	3.298872	Prob. Chi-Square(4)	0.5091

Sumber: Hasil output regresi Eviews

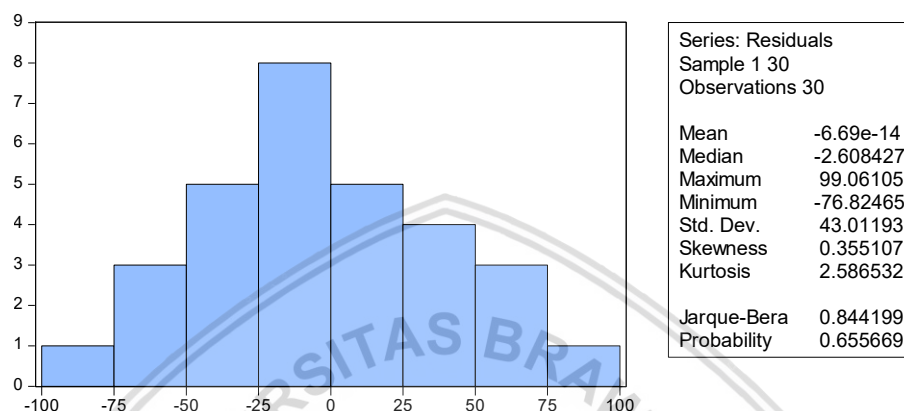
Berdasarkan tabel 4.9 di atas, hasil Uji Heteroskedastisitas diketahui nilai probabilitas R^2 adalah $0,3785 > 0,05$. Dengan demikian dalam penelitian ini tidak ada masalah Heteroskedastisitas.

4.2.2.4. Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji Normalitas dilihat dari nilai probabilitas yang dihasilkan. Apabila nilai probabilitas $> \alpha$ 5% (0,05)

maka dalam penelitian ini tidak ada masalah Normalitas, dan apabila nilai probabilitas < alpha 5% (0,05) maka dalam penelitian ini terdapat masalah Normalitas.

Tabel 4.10. Hasil Uji Regresi Normalitas



Sumber: Hasil output regresi Eviews

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, diperoleh hasil nilai probabilitas $0,655669 > 0,05$.

Dengan demikian dalam penelitian ini bebas dari masalah normalitas.

4.3. Uji Statistik

4.3.1. Uji Persamaan Regresi Data Panel

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_1), Dana Alokasi Umum (DAU) (X_2), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal (Y). Metode yang digunakan adalah regresi panel dengan model *Common Effect* dengan taraf kesalahan maksimal (alpha) sebesar 5%. Model regresi berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan sebelumnya adalah ;

$$BM_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + \beta_4 DBH_{it} + e_t$$

Tabel 4.11. Hasil Analisis Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	42.59930	22.56553	1.887805	0.0707
PAD	0.442489	0.103988	4.255204	0.0003
DAU	0.153928	0.059396	2.591562	0.0157
DAK	1.495000	0.693698	2.155116	0.0410
DBH	-0.636924	0.404624	-1.574116	0.1280
R-squared	0.931027	Mean dependent var		266.2348
Adjusted R-squared	0.919991	S.D. dependent var		163.7751
S.E. of regression	46.32526	Akaike info criterion		10.66026
Sum squared resid	53650.75	Schwarz criterion		10.89380
Log likelihood	-154.9040	Hannan-Quinn criter.		10.73497
F-statistic	84.36459	Durbin-Watson stat		1.613312
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil ouput regresi Eviews

Berdasarkan tabel 4.11 diatas, dapat diketahui bahwa :

- Nilai konstanta sebesar 42.59930 yang berarti bahwa jika nilai PAD, DAU, DAK, dan DBH adalah konstan (0) maka nilai Belanja Modal adalah sebesar 42.599930.
- Nilai koefisien regresi PAD (X1) memiliki hubungan positif 0.442489, yang berarti setiap kenaikan 1% PAD maka belanja modal akan mengalami kenaikan sebesar 0,442489 satuan. Dalam hal ini faktor lain dianggap tetap.
- Nilai koefisien regresi DAU (X2) memiliki hubungan positif 0.153928, yang berarti setiap kenaikan 1% DAU maka belanja modal akan mengalami kenaikan sebesar 0.153928 satuan. Dalam hal ini faktor lain dianggap tetap.
- Nilai koefisien regresi DAK (X3) memiliki hubungan positif 1.495000, yang berarti setiap kenaikan 1% DAK maka belanja modal akan mengalami kenaikan sebesar 1.495000 satuan. Dalam hal ini faktor lain dianggap konstan.

- e. Nilai koefisien regresi DBH (X4) memiliki hubungan negatif -0.636924, yang berarti setiap perubahan 1 % DBH maka belanja modal akan mengalami penurunan 0.636924 satuan. Dalam hal ini faktor lain dianggap tetap.

4.3.2. Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan dengan menguji signifikansi parameter regresi secara simultan, dimana seluruh variabel independen yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui hasil uji statistic F menunjukkan nilai signifikansi $0.000000 < 0.05$, yang berarti bahwa secara serentak atau secara keseluruhan variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.

4.3.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Dalam penelitian ini berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui hasil uji koefisien determinasi sebesar 93%, yang berarti secara bersama-sama atau secara keseluruhan variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH mempunyai kontribusi menjelaskan belanja modal sebesar 93%, sedangkan sisanya 7% ($100\% - 93\%$) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian.

4.4. Pembahasan Hasil Penelitian

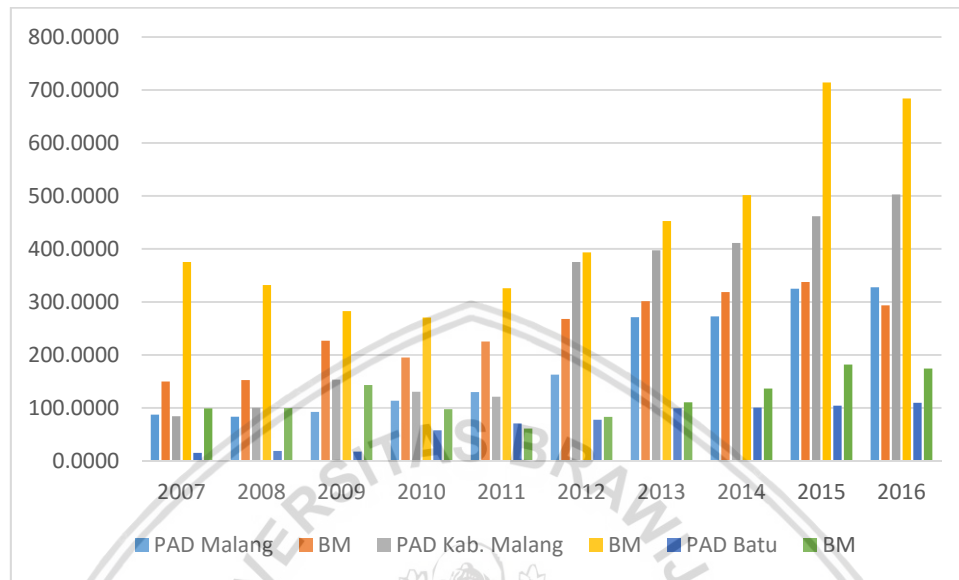
4.4.1. Pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal

Sejak diberlakukannya desentralisasi fiskal, daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk bisa membiayai kebutuhan daerahnya,

daerah memiliki sumber pendapatan yang disebut dengan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang didapatkan oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan daerah yang sah (Mardiasmo, 2002). Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimanfaatkan untuk membiayai belanja daerah, salah satunya belanja modal untuk proses pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.8, diperoleh hasil uji regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,442489 dengan t sebesar 4,255204 dan probabilitas $0,0003 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di wilayah Malang Raya. Hasil ini membuktikan bahwa pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga/daerah dalam perekonomian bergantung pada besarnya pendapatan yang diterima, sesuai dengan teori konsumsi dari Keynes yang digunakan sebagai dasar pemikiran dalam penelitian ini. Begitu pula yang terjadi pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh terhadap pengeluaran belanja modal di wilayah Malang Raya pada tahun 2007-2016. Semakin tinggi nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima, maka semakin tinggi pula belanja modal yang dilakukan oleh daerah tersebut. Berikut grafik Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal di wilayah Malang Raya tahun 2007-2016:

Gambar 4.4. Grafik Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal di Wilayah Malang Raya Tahun 2007-2016



Sumber: Data diolah DJPK, 2018

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik kepada masyarakat, setiap pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam APBD untuk membiayai program kegiatan dalam periode anggaran tertentu. Pengalokasian belanja modal digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan aset tetap pemerintah daerah, yaitu bangunan, peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya (Darwanto & Yulia, 2007). Setiap tahunnya pemerintah daerah mengalokasikan belanja modal untuk mengganti aset lama ataupun untuk pembelian aset baru sehingga aset tetap pemerintah daerah yang bersumber dari pelaksanaan APBD yang merupakan *output/outcome* dari terealisasinya belanja modal dalam setiap tahunnya.

Hasil penelitian tersebut didukung oleh beberapa kemajuan-kemajuan di wilayah Malang Raya. Salah satu contohnya adalah perbaikan-perbaikan jalan yang dilakukan di daerah yang sudah menunjukkan kemajuan menjadi lebih baik dan layak

untuk digunakan masyarakat. Begitu pula yang terjadi di Kota Malang, terdapat beberapa daerah yang mengalami pelebaran jalan raya guna untuk mengurangi kemacetan di Kota Malang. Hal tersebut membuktikan bahwa pengalokasian PAD digunakan dengan baik untuk membiayai belanja modal di wilayah Malang Raya salah satunya untuk perbaikan dan pelebaran jalan untuk warga Malang Raya.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Darwanto dan Yustikasari (2007), Nuarisa (2013), Tuasikal (2008), Haryanto (2013) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

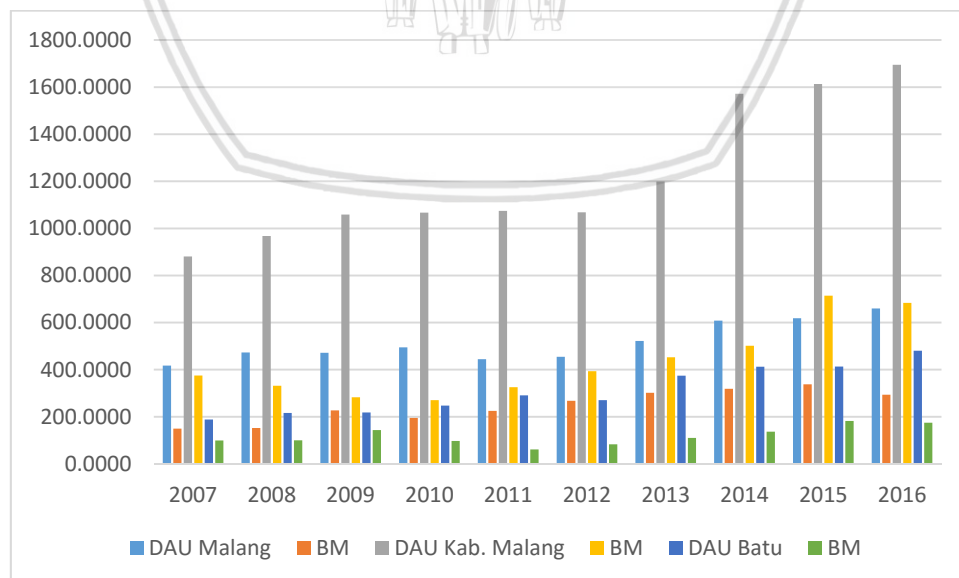
4.4.2. Pengaruh DAU Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk daerah yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya (UU No. 23 Tahun 2004). Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari APBN. Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi ditetapkan sebesar 10% dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sebesar 90% dari Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Alokasi dasar dihitung berdasarkan realisasi gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) tahun sebelumnya ($t-1$) yang meliputi gaji pokok dan tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan pembayaran gaji PNS yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.8 diatas, diperoleh hasil uji regresi variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0,153928 dengan t sebesar 2,591562

dan probabilitas $0,0157 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di wilayah Malang Raya tahun 2007-2016. Hal ini membuktikan bahwa pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga/daerah dalam perekonomian bergantung pada besarnya pendapatan yang diterima, sesuai dengan teori konsumsi dari Keynes yang digunakan sebagai dasar pemikiran dalam penelitian ini, dimana Dana Alokasi Umum (DAU) juga merupakan pendapatan daerah yang diterima dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN. Begitu pula yang terjadi pada penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang berpengaruh terhadap pengeluaran belanja modal di wilayah Malang Raya pada tahun 2007-2016. Semakin tinggi nilai Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima, maka semakin tinggi pula belanja modal yang dilakukan oleh daerah tersebut. Berikut grafik Dana Alokasi Umum (DAU) dan belanja modal di wilayah Malang Raya tahun 2007-2016:

Gambar 4.5. Grafik Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal di Wilayah Malang Raya Tahun 2007-2016



Sumber: Data diolah DJPK, 2018

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diberikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan daerah guna membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Hal itu dilakukan karena setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang berbeda-beda. Pemerintah daerah dapat menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Ardhani, 2011). Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat *block grant* yang berarti penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Bagi daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah, maka Dana Alokasi Umum memiliki peran yang penting dalam mencukupi belanja modal di daerah tersebut.

Pada penjelasan sebelumnya disebutkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk mengurangi ketimpangan yang ada di daerah. Salah satu masalah ketimpangan adalah kemiskinan. Dalam penelitian ini, Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada di wilayah Malang Raya. Contohnya adalah di Kota Batu, pemerintah Kota Batu memiliki program pengurangan kemiskina yaitu memberikan bantuan uang tunai untuk warga miskin dan penyandang cacat. Bantuan tersebut berupa santunan untuk warga miskin Rp 500.000,. per bulan dan Rp 500.000,. per bulan untuk penyandang cacat, dan mereka juga mendapat beras. Pemerintah Kota Malang juga memiliki program untuk menekan angka kemiskinan seperti bedah rumah, pelatihan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, salah satu contohnya adalah pemberdayaan masyarakat di Kampung Warna-Warni. Pemerintah Kabupaten Malang juga melakukan beberapa program untuk mengatasi

masalah kemiskinan, yaitu salah satunya berupa pemberian bantuan langsung tunai kepada warganya yang miskin.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Syukriy dan Halim (2006), Haryanto (2013), Abdullah dan Halim (2002), Nuarisa (2013), Tuasikal (2008) yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

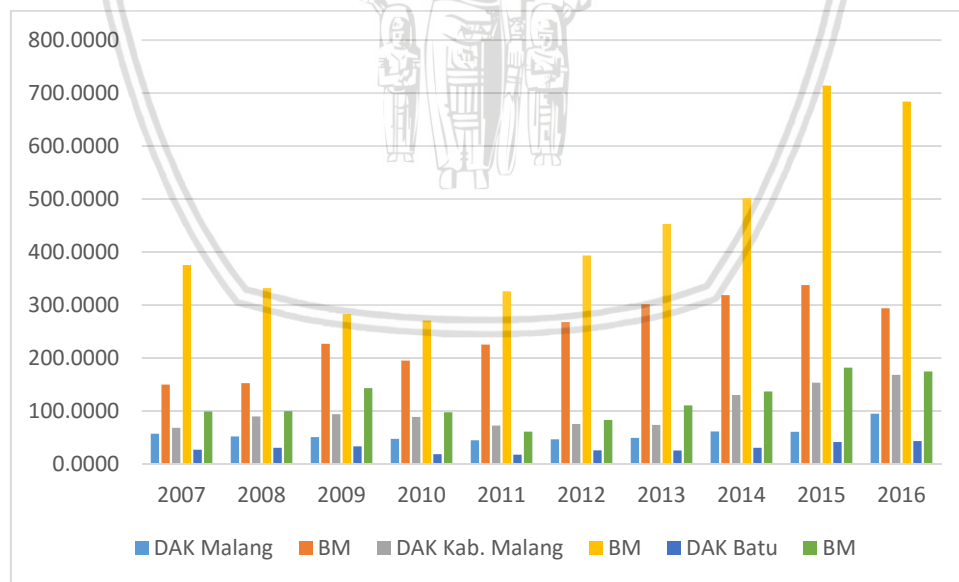
4.4.3. Pengaruh DAK Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus daerah tersebut, termasuk dana yang berasal dari dana reboisasi (UU No. 23 Tahun 2014). Pengalokasian Dana Alokasi Khusus memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN yang berarti besaran Dana Alokasi Khusus tidak dapat dipastikan setiap tahunnya. Yang termasuk dalam kebutuhan khusus antara lain seperti kebutuhan yang tidak termasuk dalam perhitungan rumus Dana Alokasi Umum, dan/atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Penerimaan negara yang berasal dari dana reboisasi sebesar 40% disediakan kepada daerah penghasil sebagai Dana Alokasi Khusus. Tujuan dari penggunaan Dana Alokasi Khusus dapat diarahkan pada upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dikarenakan besarnya tingkat kemiskinan yang ada di daerah.

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.8 diatas, diperoleh hasil uji regresi variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 1,495000 dengan t sebesar 2,1574116 dan probabilitas $0,0410 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di wilayah

Malang Raya tahun 2007-2016. Hal ini membuktikan bahwa pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga/daerah dalam perekonomian bergantung pada besarnya pendapatan yang diterima, sesuai dengan teori konsumsi dari Keynes yang digunakan sebagai dasar pemikiran dalam penelitian ini, dimana Dana Alokasi Khusus (DAK) juga merupakan pendapatan daerah yang diterima dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN. Begitu pula yang terjadi pada penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berpengaruh terhadap pengeluaran belanja modal di wilayah Malang Raya pada tahun 2007-2016. Semakin tinggi nilai Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima, maka semakin tinggi pula belanja modal yang dilakukan oleh daerah tersebut. Berikut grafik Dana Alokasi Khusus (DAK) dan belanja modal di wilayah Malang Raya tahun 2007-2016:

Gambar 4.6. Grafik Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal di Wilayah Malang Raya Tahun 2007-2016



Sumber: Data diolah DJPK, 2018

Tujuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah dan yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengan diarahkannya pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Ardhani, 2011).

Salah satu contoh pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah penggunaannya dalam program pendidikan di wilayah Malang Raya. Kota Malang memfokuskan pada pelayanan pendidikan untuk bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang ekonominya masih lemah. Salah satu contoh yang paling baru adalah dikeluarkannya bus sekolah sebagai kendaraan gratis untuk menuju sekolah. Pemerintah Kabupaten Malang juga memberikan bantuan dalam sector pendidikan berupa pemberian seragam sekolah gratis bagi siswa yang kurang mampu. Pemerintah Kota Batu juga memberikan bantuan bagi sector pendidikan yaitu bantuan untuk renovasi bangunan sekolah-sekolah yang kurang layak untuk digunakan kegiatan belajar mengajar.

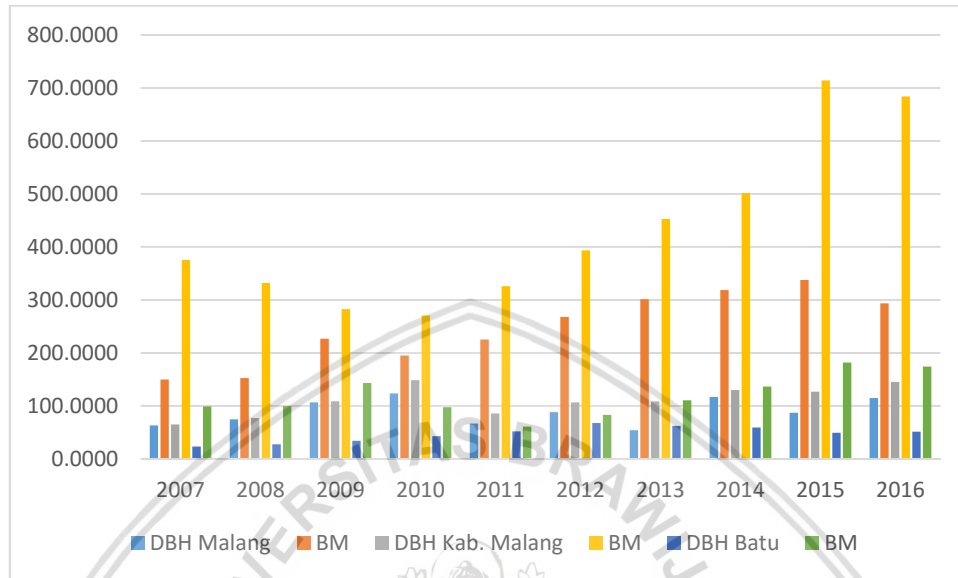
Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Nugraeni (2011), Nuarisa (2013), Tuasikal (2008), Wandira (2013) yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

4.4.4. Pengaruh DBH Terhadap Belanja Modal

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditransfer pemerintah terbagi atas 2 jenis, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA). Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Wandira, 2013).

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.8 diatas, diperoleh hasil uji regresi variabel Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar $-0,636924$ dengan t sebesar $-1,574116$ dan probabilitas $0,1280 > 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal di wilayah Malang Raya tahun 2007-2016. Hal ini menjelaskan bahwa besaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima di wilayah Malang Raya pada tahun 2007-2016 tidak berpengaruh pada pengalokasian belanja modal, dan hal tersebut tidak sesuai dengan teori dari Keynes yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini yang menyebutkan bahwa pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga/daerah dalam perekonomian bergantung pada besarnya pendapatan yang diterima. Berikut grafik Dana Alokasi Khusus (DAK) dan belanja modal di wilayah Malang Raya tahun 2007-2016:

Gambar 4.7. Grafik Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Modal di Wilayah Malang Raya Tahun 2007-2016



Sumber: Data diolah DJPK, 2018

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa dalam penelitian ini Dana Bagi Hasil (DBH) tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal, dan hal ini merupakan hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Menurut peneliti hal tersebut terjadi karena pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) digunakan untuk belanja daerah lain yang tidak termasuk dalam belanja modal dan tidak terdapat penelitian ini. Salah satu contohnya adalah hampir setiap hari Minggu selalu diadakan berbagai macam acara di Kota Malang tepatnya di sekitaran Balai Kota Malang. Mulai dari acara jalan sehat, pengajian, bazar, hingga konser music yang bukan termasuk dalam komponen belanja modal.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja modal di Wilayah Malang Raya pada tahun 2007-2016. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknis analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Wilayah Malang Raya pada tahun 2007-2016. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai PAD yang didapat maka semakin tinggi jumlah belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah. Hal tersebut didukung dengan kemajuan-kemajuan di wilayah Malang Raya. Salah satu contohnya adalah perbaikan-perbaikan jalan yang dilakukan di daerah yang sudah menunjukkan kemajuan menjadi lebih baik dan layak untuk digunakan masyarakat. Begitu pula yang terjadi di Kota Malang, terdapat beberapa daerah yang mengalami pelebaran jalan raya untuk mengurangi kemacetan.
2. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Wilayah Malang Raya pada tahun 2007-2016. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai DAU yang diterima maka semakin tinggi jumlah belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah. Pengalokasian DAU digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada di wilayah Malang Raya guna menekan angka kemiskinan. Pemerintah di Wilayah Malang Raya

memberikan beberapa bantuan kepada masyarakat miskin dan cacat untuk memenuhi kebutuhan mereka agar masyarakat bisa hidup sejahtera.

3. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Wilayah Malang Raya pada tahun 2007-2016. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai DAK yang diterima maka semakin tinggi jumlah belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah. Pengalokasian DAK digunakan untuk mendukung program pemerintah daerah di sektor pendidikan. Contohnya adalah dengan pengadaan bus sekolah, pemberian seragam gratis, dan pemberian bantuan untuk renovasi sekolah. Bantuan-bantuan tersebut diberikan dengan tujuan untuk mempermudah proses belajar mengajar khususnya bagi siswa yang kurang mampu.
4. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Wilayah Malang Raya pada tahun 2007-2016. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai DBH yang diterima tidak diikuti dengan kenaikan belanja modal, dikarenakan DBH tidak digunakan untuk membiayai selain belanja modal. Salah satu contohnya digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan yang diadakan di wilayah Malang Raya, yang dimana kegiatan tersebut tidak termasuk dalam belanja modal.
5. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PAD, DAK, DAU, dan DBH berpengaruh terhadap belanja modal di Wilayah Malang Raya tahun 2007-2016.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal sehingga diharapkan bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan penerimaan daerah dengan menggali potensi daerahnya sebagai salah satu sumber pendapatan daerah guna semakin semakin meningkatkan belanja modal.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal yang berarti peran pemerintah pusat masih cukup besar dalam membantu pemerintah daerah dalam memenuhi belanja modal. Disini pemerintah diharapkan mampu meningkatkan potensi yang dimiliki untuk bisa meningkatkan penerimaan daerah agar mampu meminimalkan peran pemerintah pusat dalam mencukupi belanja modal.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DBH tidak berpengaruh terhadap belanja modal yang berarti pemerintah diminta untuk menggali atau meningkatkan faktor-faktor lain yang bisa digunakan untuk membantu mencukupi belanja modal.
4. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan mampu memiliki alasan yang lebih kuat untuk melakukan penelitian sejenis penelitian ini, agar mampu memberikan kontribusi bagi beberapa pihak yang terkait. Juga diharapkan mampu memberikan hasil yang nantinya bisa digunakan untuk bahan evaluasi oleh pemerintah daerah atau lembaga terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy & Halim, Abdul. 2006. Studi Atas Belanja Modal Pada Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Hubungannya Dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2, 17-32.
- Ardhani, Pungki. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Umum (DAK) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Semarang: Universitas Diponegoro*.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Case, Karl E & Ray, C. Fair. 2007. *Prinsip-Prinsip Ekonomi, Edisi Kedelapan, Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Darwanto & Yustikasari, Y. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Makalah Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X, Makasar*.
- Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan Kementerian Keuangan. 2018. <http://djpk.depkeu.go.id> diakses pada tanggal 1 Februari 2018.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometrika Dasar. Terjemahan: Sumarno Zain*. Jakarta: Erlangga.
- Gujarati, Damodar. 2012. *Dasar-Dasar Ekonometrika. Terjemahan: Mangunsong, Buku 2, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2002. Analisis Varian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Indonesia. *Yogyakarta: Universitas Gajah Mada*.
- Hariato, David & Priyo, Hari Adi. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pendapatan Per Kapita. *Makassar: Simposium Nasional X*.
- <http://infokepanjen.com> diakses pada tanggal 15 April 2018.
- <http://radarmalang.id/program-dinas-pendidikan-kota-malang-terbaik-di-jatim/>. Diakses pada tanggal 6 Juli 2018.
- <http://suryamalang.trubinnews.com>. Diakses pada tanggal 6 Juli 2018.
- <http://tirto.id/kpk-tetapkan-19-tersangka-baru-suap-apbd-malang-termasuk-wali-kota-cGw2>. Diakses pada tanggal 6 Juli 2018.
- Kuncoro, Mudrajad. 2014. *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi 3*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

- Marizka. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2006-2011. *Jurnal Akuntansi Vol. 1, No. 3 (2013) Seri G. Universitas Negeri Padang*.
- Nogi Tangkilisan, Hassel. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.
- Nuarisa, Sheila Ardian. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal (AAJ) 2 (1) (2013) ISSN 2252-6765*.
- Nugraeni. 2011. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Akmenika UPY Vol. 8*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2016. Sekretaris Negara. Jakarta.
- Sekretariat Negara RI. 2004. *Penjelasan UU No. 32 Tahun 2004 Pemda Jakarta*.
- Situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS). 2018. <http://bps.go.id> diakses pada tanggal 3 Februari 2018.
- Situs resmi Kabupaten Malang. 2018. <http://malangkab.go.id> diakses pada tanggal 15 April 2018.
- Situs resmi Kota Batu. 2018. <http://batukota.go.id> diakses pada tanggal 15 April 2018.
- Situs resmi Kota Malang. 2018. <http://malangkota.go.id> diakses pada tanggal 15 April 2018.
- Tuasikal, Askam. 2008. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi, Vol.1, No.2 Juli*.
- UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sekretaris Negara. Jakarta.
- UU RI No. 25 Tahun 1999 Tentang Keuangan Daerah. Sekretaris Negara. Jakarta.
- UU RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Sekretaris Negara. Jakarta.
- UU RI No. 34 Tahun 2000 Tentang Otonomi Daerah. Sekretaris Negara. Jakarta.
- Wandira, A. G. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal. Vol. 1 (3)*.
- Widarjono, Agus. 2009. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Realisasi PAD, DAU, DAK, DBH, dan Belanja Modal di Wilayah Malang Raya Tahun 2007-2016

		PAD	DAU	DAK	DBH	Belanja Modal
Malang	2007	87,115,7	417,300,0	56,934,0	63,133,8	149,646,8
	2008	83,403,6	473,050,5	51,782,0	74,579,8	152,465,4
	2009	92,476,4	471,739,2	50,597,0	106,637,0	226,717,5
	2010	113,490,0	494,911,0	47,477,0	123,635,0	195,134,0
	2011	129,794,4	444,576,6	44,673,7	66,851,2	225,176,0
	2012	162,860,0	454,940,0	46,569,0	88,027,0	267,895,0
	2013	271,094,0	522,239,0	49,095,0	54,069,0	301,453,0
	2014	272,545,0	608,448,0	61,304,0	116,944,0	318,462,0
	2015	324,938,8	618,758,9	60,590,6	87,015,10	337,647,6
	2016	327,541,6	659,678,2	94,813,8	114,874,4	293,667,2
Kab. Malang	2007	84,353,9	880,921,0	68,184,0	64,805,1	375,243,2
	2008	100,327,7	967,647,2	89,739,0	77,072,6	331,809,5
	2009	153,526,4	1,059,098,7	93,983,0	108,708,1	282,790,5
	2010	130,466,0	1,067,107,0	88,659,0	148,456,0	270,554,0
	2011	121,130,9	1,074,119,6	72,540,0	85,786,7	325,728,0
	2012	375,330,0	1,068,011,0	75,471,0	106,619,0	393,538,0
	2013	397,339,0	1,199,362,0	73,694,0	108,379,0	452,837,0
	2014	411,185,0	1,572,192,0	130,051,0	129,757,0	501,504,0
	2015	461,887,7	1,613,161,8	153,350,4	126,719,0	714,192,9
	2016	502,755,0	1,694,884,7	168,164,7	145,219,9	683,932,4
Batu	2007	14,944,4	188,025,0	26,712,6	23,095,9	99,094,5
	2008	18,625,0	215,977,8	30,520,0	27,590,3	99,735,0
	2009	17,386,7	218,135,4	33,037,0	34,171,8	143,102,7
	2010	57,736,0	247,723,0	18,275,0	42,736,0	97,543,0
	2011	70,775,0	290,823,0	17,585,0	51,924,0	60,912,0
	2012	77,684,0	270,641,0	25,473,0	67,564,0	82,946,0
	2013	99,249,0	374,362,0	25,376,0	62,281,0	110,440,0
	2014	100,494,0	412,378,0	30,351,0	59,265,0	136,627,0

Lampiran 1 : Data Realisasi PAD, DAU, DAK, DBH, dan Belanja Modal di Wilayah Malang Raya Tahun 2007-2016

	2015	104,233,6	413,219,7	41,314,4	49,212,6	181,882,3
	2016	109,533,5	480,460,0	43,063,6	51,317,1	174,368,7

Sumber: DJPK, data diolah

Lampiran 2 : Tabel Hasil Regresi Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: EST

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.956428	(2,23)	0.1642
Cross-section Chi-square	4.713296	2	0.0947

Sumber: Hasil output regresi Eviews

Lampiran 3 ; Tabel Hasil Regresi Uji *Lagrange Multiplier*

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.038088	2.292065	2.330153
	(0.8453)	(0.1300)	(0.1269)

*Mixed chi-square asymptotic critical values:

1%	7.289
5%	4.321
10%	2.952

Sumber: Hasil output regresi Eviews

Lampiran 4 : Tabel Hasil Uji Regresi Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.008898	Prob. F(2,23)	0.9911
Obs*R-squared	0.023194	Prob. Chi-Square(2)	0.9885

Sumber: Hasil output regresi Eviews

Lampiran 5 : Tabel Hasil Uji Regresi Multikolinieritas

Variance Inflation Factors

Date: 05/17/18 Time: 05:50

Sample: 1 30

Included observations: 30

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	509.2029	7.118301	NA
PAD	0.010813	7.580519	2.908285
DAU	0.003528	31.96367	8.994095
DAK	0.481217	35.29003	9.169654
DBH	0.163720	18.17524	2.705289

Sumber: Hasil output regresi Eviews

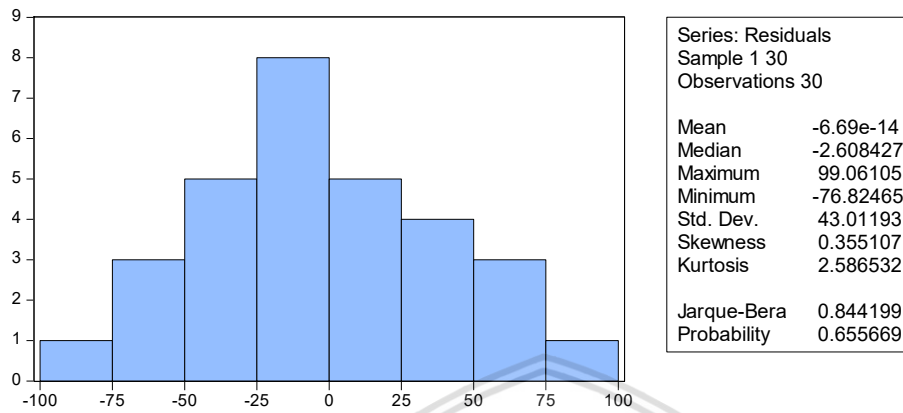
Lampiran 6 : Tabel Hasil Uji Regresi Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	1.019954	Prob. F(4,25)	0.4162
Obs*R-squared	4.208916	Prob. Chi-Square(4)	0.3785
Scaled explained SS	3.298872	Prob. Chi-Square(4)	0.5091

Sumber: Hasil output regresi Eviews

Lampiran 7 : Tabel Hasil Uji Regresi Normalitas



Sumber: Hasil output regresi Eviews



Lampiran 8 : Tabel Hasil Analisis Regresi

Dependent Variable: BM

Method: Panel Least Squares

Date: 05/17/18 Time: 05:42

Sample: 2007 2016

Periods included: 10

Cross-sections included: 3

Total panel (balanced) observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	42.59930	22.56553	1.887805	0.0707
PAD	0.442489	0.103988	4.255204	0.0003
DAU	0.153928	0.059396	2.591562	0.0157
DAK	1.495000	0.693698	2.155116	0.0410
DBH	-0.636924	0.404624	-1.574116	0.1280
R-squared	0.931027	Mean dependent var		266.2348
Adjusted R-squared	0.919991	S.D. dependent var		163.7751
S.E. of regression	46.32526	Akaike info criterion		10.66026
Sum squared resid	53650.75	Schwarz criterion		10.89380
Log likelihood	-154.9040	Hannan-Quinn criter.		10.73497
F-statistic	84.36459	Durbin-Watson stat		1.613312
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil output regresi Eviews